

**PERAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT  
DALAM PENANGANAN PEMUKIMAN KUMUH  
MELALUI PROGRAM KOTAKU**

(Studi di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**KARTIKA ALFIANI  
NIM. 115030107111094**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2018**

## MOTTO

"DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH, MAHA PENYAYANG, SEGALA PUJI BAGI ALLAH, TUHAN SELURUH ALAM" (QS. Al-Fatihah: 1-2)

"AWALI DENGAN DO'A, JALANI DENGAN BERUSAHA, DAN AKHIRI DENGAN BERSYUKUR"

*"Success is the ability to go from one failure to another  
with no loss of enthusiasm"*

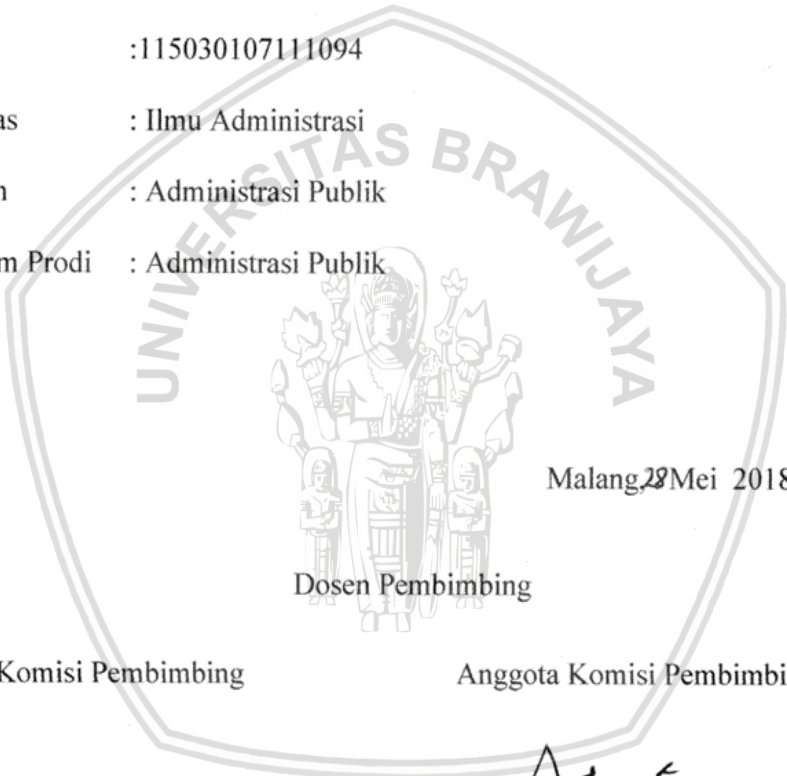
**(Sir Winston Churchill, Great Britain Prime Minister on World War II)**

"Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan ke  
Kegagalan yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil"

*(Walt Disney)*

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan  
Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Tanjungrejo Melalui Program  
Kotaku  
Disusun oleh : Kartika Alfiani  
NIM : 115030107111094  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Prodi : Administrasi Publik



Malang, 29 Mei 2018

Dosen Pembimbing

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

**Dr. Tjahjanulin Domai, MS.**  
NIP. 19531222 198010 1 001

**Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., MAP. MMG**  
NIP. 19810601 200501 1 005



**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada :

- Hari : Selasa
- Tanggal : 10 Juli 2018
- Jam : 08.00-09.00
- Skripsi Atas Nama : Kartika Alfiani
- Judul : Peran Badan Keswadayaan Masyarakat Dalam Penanganan Pemukiman Kumuh Melalui Program Kotaku (Studi di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)



Dan dinyatakan  
**LULUS**  
**MAJELIS PENGUJI**

Ketua Komisi Pembimbing

Anggota Komisi Pembimbing

**Dr. Tjahjanulin Domai, MS.**  
NIP. 19531222 198010 1 001

**Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., MAP. MMG**  
NIP. 19810601 200501 1 005

Penguji I

**Dr. Mochammad Rozikin, M. AP**  
NIP. 19630503 198802 1 001



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis atau diterbitkan orang lain, melainkan kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 23 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, Mei 2018



**Kartika Alfiani**  
**NIM. 115030107111094**

## RINGKASAN

Kartika Alfiani, 2018. **Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU (Studi di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)**. Dr. Tjahjanulin Domai, MS., Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMG. 109 Hal + xvi

---

Perkembangan kota semakin meningkat seiring dengan perubahan waktu. Perubahan waktu ini tentu memberikan dampak, salah satu masalah yang dihadapi adalah munculnya arus urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota dengan tujuan mencari penghasilan dan pekerjaan yang layak di kota. Hal ini akan berdampak munculnya kondisi demografis di kawasan perkotaan seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas yang pada akhirnya muncul jadi permukiman kumuh. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NO. 2/PRT/M/2016 terdapat Sembilan belas kriteria yang membuat suatu kawasan disebut kumuh yang dikelompokkan menjadi tujuh aspek. Tentang proses realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kota Malang membuat Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU; (2) Kendala yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku. Sumber data yang digunakan peneliti berdasarkan dari data informan, dokumen dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa (1) BKM memiliki peran sebagai penguat kelembagaan baik dari internal BKMnya sendiri dan masyarakatnya (2) dalam menjalin kerjasama bertujuan mengembangkan jaringan bekerjasama dengan masyarakat, pemerintah dan swasta dan (3) motivator bagi masyarakat dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh. Dari peran tersebut diketahui bahwa program tersebut berjalan dengan baik dan peran yang dilakukan tidak lepas sebagai upaya untuk memperdayakan masyarakat dalam upaya penanganan permukiman kumuh.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah memperbanyak pemberian informasi mengenai keuntungan menjadi kelompok swadaya masyarakat, memperbanyak pelatihan dan penguatan kelembagaan. Memaksimalkan peran BKM dalam mengembangkan jaringan agar menambah kemajuan di wilayahnya.

Kata kunci : Peran, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Permukiman Kumuh



## SUMMARY

Kartika Alfiani, 2018. **The role of Community Development Board in handling oft slum through KOTAKU's Program's (Study in Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Malang City)** . Dr. Tjahjanulin Domai, MS., Dr. Alfi Haris Wanto, SAP., M.AP., MMG. 109 Page + xvi

---

Growth of the city escalated with change time. The change this time certainly create the impact, one of the problems facing is the emergence of the current urbanization or migration village to the city with the purpose of finding income and work that is of city. This will affect the emergence of the condition of demographic in the area of urban areas like solidity of residents who are high, environmental conditions that are not suitable to live in and do not fulfill the criteria and the lack of public facilities and facilities in end up appearing so slum settlement. According to the Regulation of Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) NO. 2 / PRT / M / 2016 there are nineteen criteria that make a region called slums are grouped into seven aspects. About the process of realization of the handling of slum settlement areas, the Government of city Malang make Decree of the Mayor of Malang Number 86 years 2015 on the Implementation of Housing and Slum Residential Environment in Malang.

This research uses descriptive qualitative research method and limited by two research focus that is (1) The role of Self-Helping Society (BKM) in handling slums in Tanjungrejo Urban Village through Program KOTAKU; (2) Obstacles faced by BKM in handling slums in Tanjungrejo Urban Village through Kotaku Program.. Source of data used by researchers based on data from informants, documents and events that occur in the field. The result of this research is known that in BSM there are two running programs that are waste saving program and learning program about waste processing. of the waste saving program is known that the program is (1) The BKM has the role of institutional strengthening both from its own internal BKM and community (2) in establishing cooperation aimed at developing networks in cooperation with communities, government and private sector and (3) motivator for the community in supporting the handling of slum settlements. From the role is known that the program is running well and the role is not separated as an effort to empower the community in an effort to handle slum settlements

Recommendations that can be given from the results of this study is to increase the provision of information about the benefits of being a community self-help group, increase training and institutional strengthening. Maximizing BKM role in developing the network in order to increase the progress of territory.

Keyword : Roles, Community Development Board, Slums



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT atas kenikmatan dan kesempatan yang telah di berikan pada penulis untuk bisa mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Pemukiman Kumuh melalui Program KOTAKU.**

Skripsi merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan banyak terimakasih terutama kepada :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Tjahjanulin Domai, MS. Selaku Dosen Pembimbing I. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam proses mengerjakan skripsi ini
5. Bapak Dr. Alfi Hariswanto, SAP, MAP. MMG selaku Dosen Pembimbing II. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan, dorongan dan sumbangsih pemikiran dalam proses pengerjaan skripsi ini
6. Bapak Ibu Dosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya



7. Kepala Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo beserta jajarannya yang telah berkenan memberikan izin dan membantu dalam pengumpula data terkait peneltian di lingkungan Kelurahan Tanjungrejo
8. Spesial untuk keluarga Soedjono yakni, Sri Satiti Agustining Palupi a.k.a Tante Usti yang selalu asik aku ajak ngobrol ketika saya lagi bingung
9. Kedua orang tua saya, khususnya untuk ibu yang selalu tegar.
10. Adik Alfiana Dwi Cahyani yang selalu memberikan *support* baik doa dan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini
11. Fitri Kurnia, Lala Ashita, Vian Vrischa, Elok Rizki, Zieta Pradipta, Erry Januandari, dan Nur Qomariyah yang selalu memberikan semangat dan memberikan solusi ketika menjumpai masalah dalam penyelesaian skripsi ini
12. Khusus Ike Prasetya dan Frisky Prakarsa yang selalu mengingatkan saya untuk mengerjakan skripsi ini
13. Mahir Awad Abad yang senantiasa memberikan nasihat, semangat dan menemani ketika menyelesaikan skripsi ini
14. Teman satu perjuangan Administrasi 2011 yang satu persatu mulai sibuk cari kerja dan jodoh! See you on top!
15. Terima kasih kepada seluruh teman, sahabat, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu disini tapi nama kalian selalu ada di hati saya.

Semoga apa yang telah saya berikan baik berupa materi dan tenaga mendapatkan balasan dari Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah SWT. Saya selaku penulis merasa bahwa penelitian ini jauh dari

kata sempurna sehingga penulis masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun supaya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Malang, Mei 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
MOTTO .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	v
RINGKASAN .....	vi
SUMMARY .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kontribusi Penelitian .....	12
E. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Administrasi Pembangunan .....	15
1. Konsep Administrasi Pembangunan .....	15
2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan.....	16
3. Prinsip-prinsip Pembangunan.....	18
B. Pemberdayaan Masyarakat.....	19
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat.....	19
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	23
3. <i>Partnership</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat.....	23
4. Pendampingan sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	25
5. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat.....	29
C. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).....	30
1. Pengertian BKM.....	30
2. Tujuan BKM.....	31
3. Peran dan Fungsi BKM.....	32



4. Proses dan Pembentukan BKM.....	33
5. Prinsip dasar BKM .....	34
6. Unit-unit Pelaksana Tugas BKM.....	35
7. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan BKM/Masy.....	37
<b>D. Permukiman Kumuh .....</b>	<b>38</b>
1. Definisi Permukiman Kumuh .....	38
2. Karakteristik Permukiman Kumuh .....	39
3. Penyebab Permukiman Kumuh.. .....	42
4. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh .....	43
<b>E. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) .....</b>	<b>45</b>
1. Strategi program KOTAKU .....	48
2. Prinsip Program KOTAKU .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	53
B. Fokus Penelitian .....	53
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	54
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	54
E. Teknik Pengumpulan Data .....	57
F. Instrumen Penelitian .....	59
G. Metode Analisis .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	62
1. Gambaran Umum Kel. Tanjungrejo Kota Malang.....	62
2. Kelembagaan BKM Kel. Tanjungrejo Kota Malang .....	70
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian .....	73
1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku .....	73
a. Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh.....	73
b. Kerjasama antar lembaga pemerintah kelurahan, pihak swasta, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli dalam upaya	



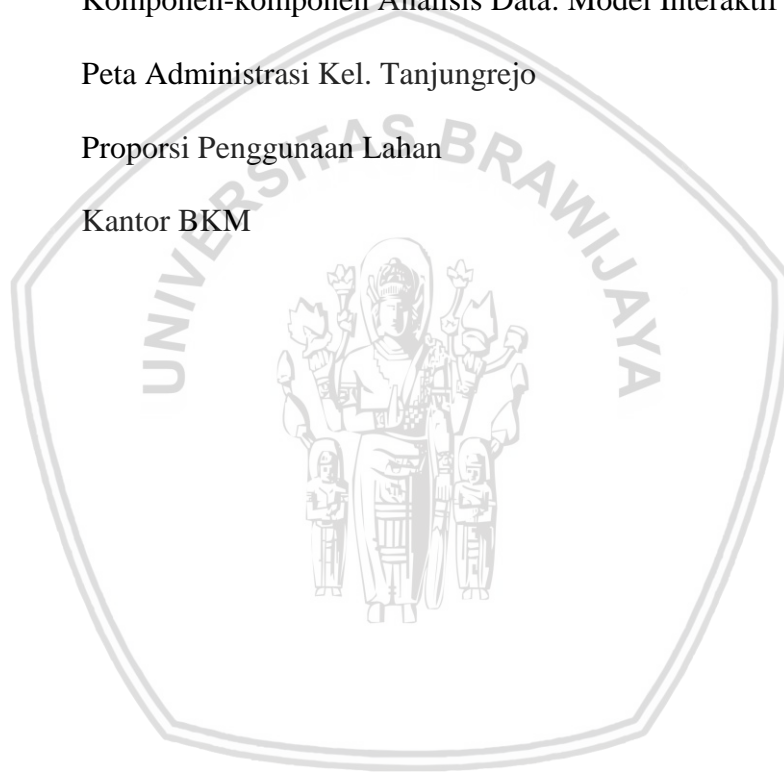
mendukung penanganan permukiman kumuh.....	79
c. BKM sebagai motivator dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh .....	82
2. Kendala yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku.....	86
C. Analisis dan Pembahasan.....	90
1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku .....	90
a. Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh.....	90
b. Kerjasama antar lembaga pemerintah kelurahan, pihak swasta, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh.....	97
c. BKM sebagai motivator dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh.....	99
2. Kendala yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku.....	103
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>

**DAFTAR TABEL**

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan Kota Malang	4
2.	Penetapan Lingkungan Kumuh Kota Malang	6
3.	Indikator Kumuh Kel. Tanjungrejo	8
4.	Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat	29
5.	Kondisi Kependudukan di Kel. Tanjungrejo	50
6.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	51
7.	Tingkat Pendidikan Masyarakat Kel. Tanjungrejo	52
8.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentan Usia	53
9.	Jumlah Sarana dan Prasarana Masyarakat	54
10.	Data Peruntukan Lahan	55
11.	Daftar Anggota Pelaksana BKM	57
12.	Daftar Sekretariat dan Unit Pelaksana BKM	58
13.	Data Baseline RW 9 Kelurahan Tanjungrejo	78

**DAFTAR GAMBAR**

No.	Judul	Halaman
1.	Presentase Wilayah Kumuh Kota Malang	5
2.	Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif	47
3.	Peta Administrasi Kel. Tanjungrejo	49
4.	Proporsi Penggunaan Lahan	56
5.	Kantor BKM	58



## DAFTAR LAMPIRAN

**No. Judul**

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan kota kian hari semakin meningkat seiring dengan perubahan waktu. Perubahan waktu ini tentu memberikan dampak, salah satu masalah yang dihadapi adalah munculnya arus urbanisasi atau perpindahan penduduk desa ke kota dengan tujuan mencari penghasilan dan pekerjaan yang layak di kota. Hal ini akan berdampak munculnya kondisi demografis di kawasan perkotaan seperti kepadatan penduduk yang tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta minimnya fasilitas umum dan fasilitas sosial berupa fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya yang pada akhirnya muncul jadi permukiman kumuh.

Masalah permukiman merupakan masalah tanpa akhir (*the endless problems*) (Hariyanto, 2007: 12). Betapa tidak, masalah papan bagi manusia senantiasa menjadi pembicaraan yang seolah tanpa akhir. Bukan hanya di kota-kota besar saja masalah ini mengemuka, tetapi di kota kecilpun masalah permukiman tersebut menjadi bahan pembicaraan. Masalah permukiman berkaitan dengan proses pembangunan, serta kerap merupakan cerminan dari dampak keterbelakangan pembangunan. Sebagaimana yang diungkapkan Riggs (1986:77) pembangunan tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program rencana dalam rangka membentuk

lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program. Kenyataan yang terjadi pemerintah belum dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga masih munculnya masalah permukiman. Munculnya masalah permukiman ini disebabkan, karena :

1. Kurang terkontrolnya pembangunan permukiman sehingga menyebabkan munculnya kawasan kumuh pada beberapa bagian kota yang berdampak pada penurunan daya dukung lingkungan
2. Kurang dipahaminya kriteria teknis pemanfaatan lahan permukiman khususnya yang berbasis pada ambang batas daya dukung lingkungan dan daya tampung ruang.
3. Pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat yang masih belum optimal khususnya menyangkut kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum berupaya meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999/2000 dan tahap kedua dilaksanakan 2003/2004 dan tahap ketiga di P2KP PNPM 2007/2008. Sejak tahun 2007, program tersebut berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perkotaan atau bisa disebut PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

Menurut Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 per tanggal 30 Juli 2007 mengulas mengenai Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), dalam siklus pelaksanaan program P2KP dan atau PNPM-P2KP ini telah memuat proses penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan penguatan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan. Melalui kegiatan penguatan diharapkan dapat tercipta proses transformasi secara bertahap untuk menjadi masyarakat yang mandiri dan menuju masyarakat madani dengan didukung kapasitas tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu program pembangunan dari pemerintah dalam pelaksanaannya adalah Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang sekarang ini telah berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan di mana salah satunya adanya Program Paket (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu). PNPM Mandiri Perkotaan pada tahap pertama berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap dan perilaku serta cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pada pembelajaran kemitraan dan sinergi antara

pemerintah, masyarakat, dan kelompok peduli untuk memanfaatkan berbagai peluang dan sumber daya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian, dapat dilihat letak adanya intervensi proyek dalam bentuk pendampingan dan adanya BKM agar masyarakat mau berpikir dan menyelesaikan sendiri hal yang menjadi masalah bagi masyarakat.

Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) merupakan kekuatan besar untuk menyelesaikan kumuh, mengapa kekuatan BKM begitu besar karena mereka adalah orang-orang baik yang dipilih oleh masyarakat tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Jadi mereka betul-betul relawan untuk membantu desa/kelurahannya. BKM juga memiliki pengalaman selama bertahun-tahun dalam mengorganisasikan masyarakat mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diluncurkan pada tahun 1999 dan berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada tahun 2007. Pengalaman panjang dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan dapat menjadi kekuatan besar bagi BKM untuk membantu menyelesaikan kumuh di wilayah masing-masing. Peran BKM yang awalnya fokus pada penanggulangan kemiskinan “direvitalisasi” menjadi fokus dalam menangani kumuh.

Kota Malang menjadi salah satu kota yang mengalami kemajuan pesat dalam hal pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut tentu saja menarik para pendatang sebagai kaum urban untuk mengadu nasib dalam mencari nafkah di Kota Malang yang menyebabkan semakin padatnya jumlah

penduduk di Kota Malang. Jumlah penduduk Kota Malang setiap tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

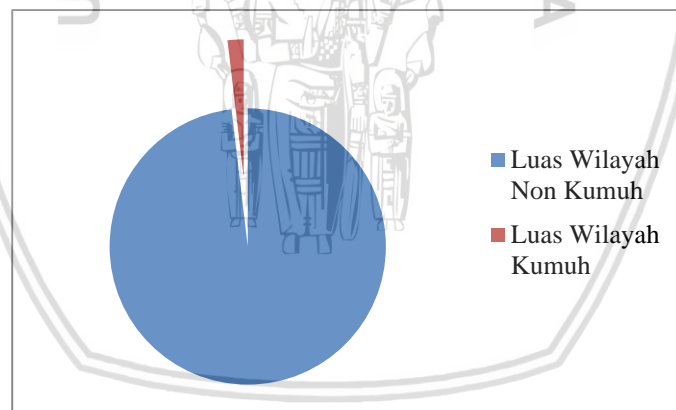
Tabel 1. Jumlah Penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Kota Malang Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (orang)			Laju Pertumbuhan Penduduk per- Tahun (%)	
	2010	2014	2015	2010-2015	2014-2015
Kedungkandang	174.477	183.927	186.068	1,29	1,16
Sukun	181.513	188.545	190.053	0,92	0,8
Klojen	105.907	104.590	104.127	-0,34	-0,44
Blimbing	172.333	176.845	177.729	0,62	0,5
Lowokwaru	186.013	192.066	193.321	0,77	0,65
<b>Jumlah</b>	<b>820.243</b>	<b>845.973</b>	<b>851.298</b>	<b>0,75</b>	<b>0,63</b>

Sumber :Malang dalam Angka (2016)

Berdasarkan tabel 1 maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Malang tiap tahun mengalami peningkatan, dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk setiap tahun yakni sebesar 0,63% dengan kawasan pertumbuhan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Kedungkandang sebesar 1,16% pertahun. Pencapaian angka ini menunjukkan beberapa masalah di kota Malang salah satunya meningkatnya kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini jika tidak diantisipasi akan menyebabkan permasalahan akan semakin kompleks. Permasalahan yang paling mendasar adalah ketersediaan ruang untuk lahan permukiman masyarakat. Jika lahan permukiman semakin berkurang maka akan menyebabkan pembentukan lahan permukiman baru yang secara legal dan ilegal.

Kepadatan bangunan perumahan di beberapa zona permukiman merupakan gejala lain yang ditunjukkan ketika lahan permukiman berkurang. Apabila persoalan ini terus menerus terjadi dan tidak di kontrol, akan menyebabkan kurang tertatanya kawasan permukiman serta sulitnya pemenuhan sarana dan prasarana kawasan permukiman. Berdasarkan SK Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 pada tahun 2015proposisi penduduk yang tinggal di daerah kumuh di Kota Malang mencapai 60,6 hektar sedangkan luas Kota Malang adalah 11,606 hektar. Sehingga jika dipresentasikan luas kawasan kumuh di Kota Malang adalah 5,53 %. Kawasan kumuh di Kota Malang tersebar di 29dari 57 kelurahan yang ada. Seperti tertera pada gambar berikut :



Gambar 1. Presentase Wilayah Kumuh Kota Malang  
Sumber : DPUPPB Kota Malang

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) NO. 2/PRT/M/2016 terdapat Sembilan belas kriteria yang membuat suatu kawasan disebut kumuh. Kriteria-kriteria tersebut dikelompokkan menjadi tujuh aspek, yaitu :

1. Kondisi bangunan

2. Jalan lingkungan
3. Penyediaan air minum
4. Drainase lingkungan
5. Pengelolaan air limbah
6. Pengelolaan persampahan
7. Proteksi kebakaran

Dalam proses realisasi penanganan kawasan permukiman kumuh, Pemerintah Kota Malang membuat Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang dengan memuat jumlah kawasan permukiman kumuh perkelurahan. Adapun daftar permukiman kumuh perkelurahan di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. Daftar Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Malang**

No.	Kelurahan	Luas (Ha)
1.	Balearjosari	2,27
2.	Blimbing	0,25
3.	Pandanwangi	0,17
4.	Purwantoro	0,05
5.	Polehan	17,50
6.	Jodipan	4,80
7.	Kotalama	25,70
8.	Mergosono	47,20
9.	Samaan	30,40
10.	Penanggungan	53,01
11.	Oro-oro Dowo	22,40
12.	Gadingkasri	42,62
13.	Bareng	81,56
14.	Kauman	3,10
15.	Kiduldalem	26,02
16.	Kasin	48,20
17.	Sukoharjo	39,20

18.	Dinoyo	0,66
19.	Tlogomas	2,54
20.	Merjosari	0,05
21.	Jatimulyo	0,40
22.	Tulusrejo	8,00
23.	Sumbersari	10,20
24.	Lowokwaru	9,50
25.	Ciptomulyo	62,60
26.	Bandungrejosari	8,40
27.	Sukun	34,35
28.	Tanjungrejo	8,40
29.	Bandulan	27,00

Sumber: SK Walikota Malang No. 86 Tahun 2015 Tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Dalam revitalisasi kawasan permukiman kumuh di Kota Malang sebagaimana bentuk realisasi program pemerintah pusat yang dikenal dengan Program 100-0-100 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU-PR). Kementerian PU-PR menargetkan 100% pelayanan air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak. Realisasi 0% kumuh di Kota Malang salah satunya adalah dengan Program KOTAKU. Program KOTAKU adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015-2019.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kota dan tingkat kelurahan. Program KOTAKU diterjemahkan ke dalam dua kegiatan yaitu peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan permukiman kumuh yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif (Uar, 2016). Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (*top-down*) dengan perencanaan mikro (*bottom-up*). Pemerintah kota



memimpin keseluruhan proses kegiatan penanganan yaitu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB). Di tingkat kelurahan, masyarakat bekerja bersama dengan pemerintah kelurahan dan kelompok peduli lainnya berpartisipasi aktif dan turut serta dalam seluruh proses pengambilan keputusan untuk penanganan permukiman kumuh.

Kelurahan yang telah direalisasikan program KOTAKU salah satunya adalah Kelurahan Tanjungrejo. Berdasarkan SK Kumuh Walikota Malang Kelurahan Tanjungrejo memiliki luas kumuh seluas 8,4 Ha. Luas kawasan kumuh di Kelurahan Tanjungrejo diakibatkan oleh banyak penduduk Kelurahan Tanjungrejo terutama di kawasan RW 09 banyak yang membuang sampah ke aliran sungai sebagai pemecahan masalah persampahan dan sanitasi yang kurang memadai. Selain itu, pola pikir dan perilaku penduduk yang belum sadar akan pentingnya tata ruang dan sanitasi menyebabkan perilakunya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Adapun karakteristik pendukung penyebab Kelurahan Tanjungrejo menjadi kawasan permukiman kumuh dijelaskan dalam Rencana Penataan Lingkungan Permukiman Kelurahan Tanjungrejo 2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. Indikator Kumuh Kelurahan Tanjungrejo**

No	KRITERIA / INDIKATOR	PARAMETER	
1	<b>Keteraturan Bangunan</b>	<b>30%</b>	Bangunan Hunian tidak memiliki keteraturan
2	<b>Kepadatan Bangunan</b>	Kawasan permukiman memiliki Kepadatan Rendah (136 unit/Ha)	
3	<b>Kelayakan Fisik Bangunan</b>	<b>21%</b>	Bangunan hunian memiliki Luas Lantai < 7,2 m <sup>2</sup> per orang

		17%	Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Dinding, Lantai tidak sesuai persyaratan teknis
4	<b>Aksesibilitas Lingkungan</b>	18%	Kawasan permukiman tidak terlayani jaringan jalan lingkungan yang memadai
		27%	Kondisi Jaringan jalan pada kawasan permukiman memiliki kualitas buruk
5	<b>Drainase Lingkungan</b>	0%	Kawasan permukiman terjadi genangan/banjir
		8%	Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas buruk
6	<b>Pelayanan Air Minum/Baku</b>	41%	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak terlayani jaringan Air Bersih/Baku perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak
		0%	Masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal 60liter/org/hari (Mandi, Minum, Cuci)
7	<b>Pengelolaan Air Limbah</b>	13%	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki akses Jamban/MCK Komunal
		31%	Bangunan hunian pada lokasi permukiman tidak memiliki kloset (Leher Angsa) yang terhubung dengan tangkiseptik
		82%	Saluran Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga tercampur dengan Drainase Lingkungan
8	<b>Pengelolaan Persampahan</b>	38%	Sampah domestik rumah tangga pada kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA kurang dari 2 kali seminggu
9	<b>Pengamanan Bahaya Kebakaran</b>	100%	Kawasan permukiman tidak memiliki Ketersediaan prasarana/sarana Proteksi Kebakaran

Sumber :RKLK Kelurahan Tanjungrejo 2016

Berdasarkan indikator pada table 3, Kelurahan Tanjungrejo memerlukan penanganan permukiman kumuh dengan cara pemugaran kawasan permukiman yang tak lepas dari peran BKM. Selain itu, upaya pemugaran kawasan permukiman di Kelurahan Tanjungrejo ini terdapat pula dukungan dari sinergitas dengan pihak-pihak lain, yaitu Pemerintah Daerah selaku fasilitator tingkat Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang serta sinergitas dengan Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis dalam hal ini tertarik melakukan penelitian yang menjadikannya sebagai bahan dalam rangka menyusun skripsi dengan judul **“Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Upaya Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program Kotaku (Studi di Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku?
2. Kendala yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya penanganan pemukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang melalui Program Kotaku.

### D. Kontribusi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat yang bermanfaat, diantaranya :

- a. Dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam disiplin ilmu administrasi publik
- b. Dapat mengetahui mengenai bagaimana peran BKM dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang



- c. Dapat mengetahui mengenai kendala penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang

## **E. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan beberapa sub bab agar mendapat gambar dan arahan yang jelas mengenai hal yang tertulis, sebagai berikut sistematika penulisan secara lengkap :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai beberapa teori yang relevan dengan peran BKM dalam penanganan permukiman kumuh melalui kotak

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang memuat tentang variabel penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis yang digunakan oleh peneliti

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang merupakan olahan bahan-bahan dan data oleh peneliti setelah melakukan penelitian di lapangan.

## **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan analisis masalah dan saran yang diberikan oleh penulis pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Pembangunan

##### 1. Konsep Administrasi Pembangunan

Perkembangan keilmuan sosial banyak memunculkan konsep yang lebih tajam. Administrasi pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam “rumpun” administrasi Negara. Administrasi pembangunan menunjuk pada berbagai usaha yang diorganisasikan untuk melaksanakan program guna mencapai sasaran pembangunan. Pada dasarnya perkembangan suatu ilmu dapat ditelusuri melalui perubahan paradigmanya Siagian (2003:12) menjelaskan pengertian administrasi pembangunan yaitu seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Tjokroamidjojo (1974:222) mendefinisikan administrasi pembangunan adalah suatu proses pembaruan yang continue dan terus-menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang lebih baik.

Pendapat lain juga dikemukakan Riggs (1986:77) tidak berarti hanya sebagai usaha-usaha pemerintah melaksanakan program rencana dalam rangka membentuk lingkungan fisik, manusia dan kebudayaannya, tetapi

juga berarti perjuangan meningkatkan kemampuan melaksanakan berbagai program. Tjokroamidjojo (1988) juga mengungkapkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan pembangunan adalah faktor politik dan administrasi. Seringkali kondisi administrasi negara yang baru berkembang tidak mendukung usaha perubahan yang bersifat pembangunan. Maka dari itu perlu direncanakan administrasi pembangunan sebagai bagian integral dari selutruh rencana. Dengan begitu adanya keserasian dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dalam kebijaksanaan dan program.

Dari berbagai pengertian diatas penulis mencoba menarik sebuah kesimpulan bahwa administrasi pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan pemerintah/Negara secara sadar, terencana dan terus menerus untuk mencapai sebuah tujuan. Secara lebih spesifik, administrasi pembangunan berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan (ke arah modernisasi, pembangunan bangsa atau pembangunan social ekonomi) dilakukan secara efektif dengan pendekatan yang multidispilin.

## **2. Ciri-ciri Administrasi Pembangunan**

Tjokroamidjojo (1974: 9) mengungkapkan ciri-ciri administrasi pembangunan, meliputi:

- a. Memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.



- b. Memiliki peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaan yang efektif bahkan administrasi ikut serta mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan social, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan melalui proses politik.
- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang di anggap lebih baik suatu masyarakat di masa depan (berorientasi masa depan)
- d. Melakukan pendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*)
- e. Berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari suatu pembangunan adalah suatu perubahan yang dilakukan secara berencana guna mendapatkan hasil yang baik dan untuk kesejahteraan masyarakat. Serta pembangunan juga merupakan hal yang sangat diperlukan dalam suatu Negara, tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, modal atau teknologi semata, factor penting yang harus diperhatikan adalah sumber daya manusia. Dengan adanya sumber daya manusia maka diperlukan pula suatu pembangunan sosial.

### 3. Prinsip-prinsip Pembangunan

Pembangunan nasional memiliki ide pokok pembangunan dengan memiliki pandangan yang jelas dan memiliki prioritas. Menurut Siagian (1984:29-30) ada lima ide pokok dalam pembangunan nasional yaitu :

- a. Pembangunan pada dirinya mengandung pengertian perubahan dalam arti mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih “baik” dari kondisi yang kini ada.
- b. Ide pokok yang kedua yang inheren dalam pengertian pembangunan ialah pertumbuhan. Pertumbuhan di sini ialah kemampuan suatu negara bangsa untuk terus berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
- c. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.
- d. Jika diterima pendapat bahwa pembangunan merupakan rangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, konotasinya ialah bahwa pembangunan itu didasarkan pada suatu rencana yang tersusun secara rapi untuk satu kurun waktu tertentu.
- e. Kiranya tepa apabila dikatakan bahwa pembangunan bermuara kepada suatu “ titik akhir” tertentu, yang untuk mudahnya

dapat dikatakan merupakan cita-cita akhir dari perjuangan dan usaha negara bangsa yang bersangkutan.

Pembangunan yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pembangunan yang dilakukan. Tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mencapai pembangunan nasional dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta mensejahterahkan rakyat. Ada sepuluh prinsip-prinsip pembangunan nasional menurut Siagian (1984:30-46) yaitu :

- a. Kesemestaan
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Keseimbangan
- d. Kontinuitas
- e. Pendekatan kesisteman
- f. Mengandalkan kekuatan sendiri
- g. Kejelasan strategi dasar
- h. Skala prioritas yang jelas
- i. Kelestarian ekologi
- j. Pemerataan disertai pertumbuhan

## **B. Pemberdayaan Masyarakat**

### **1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "pemberkuasaan", dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang

lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan ber- yang menjadi kata “berdaya” yang berarti memiliki atau mempunyai daya. Daya berarti kekuatan, berdaya berarti memiliki kekuatan. Namun pada perkembangannya dari berbagi referensi dan bidang menunjukkan keragaman pengertian atas makna *empowerment* tersebut. *Empowerment* pada umumnya diterjemahkan kedalam istilah “pemberdayaan”. Pemberdayaan artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai daya atau mempunyai kekuatan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan terlepas dari keinginan dan minat mereka (Suharto 2009:57).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan;
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli di bawah ini

mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2005:58-59)

Secara etimologis menurut Sulistiyani (2004:77) pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya “ yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya (kekuatan/kemampuan) kepada pihak yang belum berdaya. Kemudian menurut pendapat ahli lainnya seperti menurut Aziz, dkk(2005: 136) :

“Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses”.

Pemberdayaan masyarakat menurut Ali (2007: 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik. Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan (*empowerment*) mengandung makna adanya

partisipasi seluruh sasaran pelayanan dan komunitas sekitarnya serta masyarakat pada umumnya, adanya pendelegasian wewenang kepada daerah dalam menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan kesejahteraan sosial, adanya peningkatan kemampuan sasaran pelayanan, serta aktualisasi peran-peran kelembagaan social masyarakat dan swasta dalam mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial bersama-sama pemerintah (Chamsyah 2006 dalam Nasirin 2010:99)

Konsep pemberdayaan menurut Parson yang dirangkum oleh Suharto (2005) dalam Nasirin 2010: 99 menjelaskan tiga dimensi utama yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, bergunan dan mampu mengendalikan diri dan orang lain
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan

Berdasarkan uraian definisi pemberdayaan dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan merupakan

suatu langkah yang ditentukan dapat digunakan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh suatu daerah maupun masyarakat untuk dapat mengembangkan potensi tersebut agar terciptanya kemandirian.

## **2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi dalam Nasirin 2010:107 yaitu :

1. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan
2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara rasio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.

## **3. *Partnership* dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan. Adapun pihak-pihak tersebut adalah pemerintah, swasta dan masyarakat yang memiliki masing-masing peran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti table berikut ini :

Tabel 4 : Peran Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam  
Pemberdayaan Masyarakat

Aktor	Peran dalam Pemberdayaan	Bentuk <i>Output</i> Peran	Fasilitasi
Pemerintah	Formulasi dan penetapan <i>policy</i> , implementasi monitoring dan evaluasi mediasi	Kebijakan :Politik, umum, khusus/departemen/sektor al.. Penganggaran juknis dan juklak, penetapan indikator keberhasilan. Peraturan hokum, penyelesaian sengketa	Dana, Jaminan, alat, teknologi, <i>network</i> , system manajemen informasi, edukasi
Swasta	Kontribusi pada formulasi, implementasi , monitoring dan evaluasi	Konsultasi & rekomendasi kebijakan, tindakan dan langkah/ <i>policy action</i> implementasi, donator, <i>private investment</i> pemeliharaan	Dana, alat, teknologi, tenaga ahli dan sangat terampil
Masyarakat	Partisipasi dalam formulasi implementasi	Saran, input, kritik, rekomendasi, keberatan dukungan dalam formulasi kebijakan.	Tenaga terdidik, tenaga terlatih, setengah terdidik dan



	, monitoring dan evaluasi	<i>Policy action</i> , dana swadaya menjadi objek, partisipan, pelaku utama/subyek. Menghidupkan fungsi <i>social control</i>	setengah terlatih.
--	---------------------------	---	--------------------

Sumber : Sulistiyani 2004 dalam Nasirin 2010: 106

Terlihat dari table 4 bahwa ada 3 aktor yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta yang memiliki peran masing-masing dalam adanya sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat selain itu juga adanya bentuk *output* peran dari ketiga actor tersebut yang masing-masingnya menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi yang dimiliki ketiga actor tersebut. Serta adanya fasilitasi yang disediakan oleh ketiga actor tersebut dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan

#### 4. Pendampingan sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Payne dalam Adi (2003:54) dalam konteks pekerjaan social mengemukakan bahwa :

“Proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan social dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya”.

Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat Sumodiningrat (2009:7) yang mengemukakan bahwa masyarakat adalah makhluk hidup yang memiliki relasi social maupun ekonomi maka pemberdayaan social merupakan suatu upaya untuk membangun semangat hidup masing-masing secara bersama-sama. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat perlu adanya suatu strategi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Salah satu strategi yang tidak umum dipakai dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah pendampingan.

Sumodiningrat (2009:106), pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman diantara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi social, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator dan sekaligus evaluator.

Sumodiningrat (2009:104-106) lebih dalam menjelaskan bahwa bagi para pekerja social dilapangan kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan social. Terdapat 5 (lima) kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan social, yaitu :

- a. Motivasi

Masyarakat khususnya keluarga miskin perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Kemudian memotivasi mereka agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Disini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, permasyarakatan imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan local yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan yang dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri

c. Manajemen Diri

Setiap kelompok harus mampu memilih pemimpin yang nantinya dapat mengatur kegiatan mereka sendiri seperti melaksanakan pertemuan-pertemuan atau melakukan pencatatan dan pelaporan. Disini pada tahap awal, pendampingan membantu mereka untuk mengembangkan sebuah system. Kemudian memberikan

wewenang kepada mereka untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.

d. Mobilisasi Sumber

Merupakan sebuah metode untuk menghimpun setiap sumber-sumber yang dimiliki oleh individu-individu yang dalam masyarakat melalui tabungan dan sumbangan sukarela dengan tujuan untuk menciptakan modal sosial. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan dan jika sumber-sumber ini dihimpun, maka nantinya akan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial. Pengembangan sistem penghimpunan, pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ini perlu dilakukan secara cermat sehingga semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan hal ini dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan

e. Pembangunan dan Pembangunan Jaringan

Pengorganisasian kelompok-kelompok swadaya masyarakat perlu disertai dengan peningkatan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial disekitarnya. Jaringan ini sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat miskin.

Dari berbagai pengertian diatas penulis mencoba menarik sebuah kesimpulan bahwa adanya kegiatan pendampingan merupakan salah satu bentuk startegi yang ada dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini bersamaan dengan adanya kegiatn pendampingan yang ada dalam peran BKM dalam penanganan permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU yang merupakan kegiatan pendampingan sosial yang didalamnya ada beberapa kegiatan yang dilakukan

### **5. Ruang Lingkup Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan harus dilakukan secara terus menerus, komprehensif dan simultan sampai ambang tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan yang diperintah sebagaimana yang dikatakan Ndraha dalam Sumaryadi (2005;145) diperlukan berbagai program pemberdayaan sebagai berikut :

#### **a. Pemberdayaan Politik**

Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui *bargaining* tersebut yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan orang lain.

#### **b. Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negative

pertumbuhan, pemikul beban pembangunan dan penderita kerusakan lingkungan

c. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pemberdayaan social budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia dan perilaku seadil-adilnya terhadap manusia.

d. Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan supaya antara yang diperintah dan lingkungannya terhadap hubungan saling menguntungkan.

### C. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

#### 1. Pengertian BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan suatu institusi local yang dibentuk melalui program PNPM di desain sebagai institusi sukarela dengan demikian proses dan pembentukannya tidak banyak campur tangan pemerintah. Dibanding dengan program pemerintah yang lain, program ini lebih kental dengan nuansa pendekatan (Soetomo, 2012:172).

BKM merupakan lembaga masyarakat yang pada hakekatnya mengandung pengertian sebagai wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat yang dikelola dan

dibangun berdasarkan nilai-nilai universal (Buku Pedoman Badan Keswadayaan Masyarakat).

BKM adalah kelembagaan yang dirancang untuk membangun kembali kehidupan masyarakat mandiri yang mampu mengatasi kemiskinan. Disamping itu BKM mengemban misi untuk menumbuhkan kembali ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan bersama. BKM adalah dewan pemimpin kolektif masyarakat penduduk kelurahan, dan sebagai lembaga BKM dapat bertindak sebagai representasi masyarakat kelurahan.

## 2. Tujuan BKM

Dalam buku pedoman teknis tinjauan partisipatif PNPM perkotaan (2007:02) BKM dibentuk sebagai lembaga pimpinan kolektif sebagai motor penggerak penumbuhan kembali *capital social* seperti antara lain solidaritas, kesatuan, gotong royong, dana sebagainya. Dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan dalam menjalankan peran tersebut, BKM mengorganisasikan warga untuk program jangka menengah tiga tahunan penangan wilayah kumuh. Berdasarkan PJM dan rente Pronangkis kelurahan atau desa inilah BKM kemudian menyusun rencana kerja BKM sendiri.

Seiring perjalanan waktu, BKM akan mengalami perubahan baik yang direncanakan maupun tidak. Begitu pula dengan program. Karena itu, dibutuhkan alat periksa untuk melihat dan memikirkan kembali perkembangan kelembagaan dan program yang dikerjakan. Melalui

kegiatan tinjauan ulang secara partisipatif, BKM secara sadar dapat mengontrol gerak, kesesuaian sumber daya, pilihan cara dan saling menjaga kinerja diantara para anggota dan unit pengelola.

### 3. Peran dan Fungsi BKM

Menurut Soetomo (2012: 172) fungsi BKM yaitu :

1. Fungsi ke dalam yaitu sebagai media partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
2. Fungsi ke luar yaitu sebagai representasi masyarakat lokal dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pada *stakeholder*.

Peran pokok BKM yaitu memberikan persetujuan dan menilai serta mengkoordinasikan rencana kegiatan dari KSM baik berupa Kelompok-Kelompok Usaha Bersama (KUBE), maupun kelompok pengelola pembangunan sarana dan prasarana lingkungan. BKM memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat.

Dalam penanganan tugas sehari-hari BKM didampingi dan dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) dan fasilitator kelurahan yang bertugas dilapangan. Secara terperinci, BKM bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut (Tim Badan Keswadayaan Masyarakat, 2005) :

1. Melakukan koordinasi dan pemantauan kegiatan dan organisasi kerja KSM dalam pembangunan prasarana dan sarana dasar lingkungan dan kegiatan pengembangan usaha.



2. Menyusun dan menetapkan kegiatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diprioritas
3. Mengkaji dan menyetujui permintaan pencairan dana bantuan, sesuai dengan tahapan-tahapan pengerjaan dilapangan
4. Mengelola dana melalui Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai unsur pelaksana pengelola keuangan BKM
5. Menjamin keterbukaan dalam penggunaan dana serta meningkatkan kesadaran akan hak yang sama untuk berperan serta
6. Menyadarkan dan meyakinkan kaum perempuan dan generasi muda akan hak yang sama untuk berperan serta
7. Menyediakan papan informasi di tempat yang mudah dijangkau dan mengumumkan daftar usulan KSM, laporan kemajuan fisik dan keuangan KSM dan laporan keuangan BKM
8. Menyediakan kotak saran dan keluhan yang menyangkut kegiatan, kemudian menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang dimasukkan ke dalam kotak saran tersebut.
9. Memberikan penghargaan terhadap usulan proyek yang baik sesuai dengan criteria yang disepakati bersama KSM sebelum suatu kegiatan dilaksanakan.

#### 4. Proses Pembentukan BKM

Mekanisme pembentukan BKM terlebih dahulu harus melaksanakan siklus-siklus dan tahapan yang ada dalam P2KP antara lain melakukan Sosialisasi awal, Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM), *Focus Group Discussion*-Refleksi Kemiskinan (FGD-RK), Pemetaan Swadaya (PS) dan sampailah pada siklus BKM, sebelum melakukan pembentukan BKM, maka terlebih dahulu harus membentuk Panitia-panitia (pokja-pokja) yaitu Pokja pemilihan, Anggaran Dasar (AD), dan Pemantau, pokja-pokja inilah yang akan membantu melaksanakan proses pembentukan BKM mulai dari Sosialisasi, Penjaringan tingkat RT sampai Desa/Kelurahan dan sudah barang tentu panitia tersebut dibantu oleh relawan-relawan yang ada di desa/Kelurahan masing-masing. Jadi kegiatan tersebut dapat di paralel

atau dilaksanakan pada beberapa tempat/RT secara bersamaan, tentunya halnya ini tergantung pada kemampuan panitia dan relawan serta Fasilitator Kelurahan (faskel).

## 5. Prinsip dasar BKM

Pemanfaatan bantuan diarahkan agar dapat berlatih menggunakan dana tersebut, sebagai stimulant dalam pengembangan lebih lanjut dapat memanfaatkan fasilitas *microfinance*. Dilakukan melalui bantuan dana yang dipergunakan untuk membiayai inverstasi social dan investasi ekonomi. Bantuan dana sepenuhnya untuk menciptakan kegiatan ekonomi produktif yang berlanjut (Nasirin, 2010:109).

Prinsip dasar yang melndasi BKM (Tim Badan Keswadayaan Masyarakat, 2005) yaitu:

1. BKM adalah organisasi berdasarkan anggota aktif artinya :keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh BKM haruslah melibatkan seluruh anggota
2. BKM adalah organisasi demokratis, dalam arti setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Proses-proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dan partisipatif.
3. BKM adalah organisasi yang terbuka sehingga setiap warga masyarakat khususnya pihak-pihak yang termasuk kelompok-kelompok sasaran dan pihak-pihak yang dianggap mampu

mengembangkan dan mencapai tujuan BKM, dapat dilihat dalam berbagai kegiatan BKM.

4. BKM adalah organisasi yang tidak membedakan orang atau tidak diskriminatif baik dari jenis kelamin, usia, status perkawinan, suku maupun agama.

Sejalan dengan itu prinsip-prinsip P2KP yaitu menciptakan peluang-peluang ataupun mekanisme-mekanisme agar nilai luhur yang sudah ada di warga dapat muncul dipermukakan, sehingga pimpinan yang dipilih, pengambilan keputusan, serta pembuatan karya yang akan dilakukan oleh warga akan dilakukan sesuai dengan keyakinannya pada nilai-nilai luhur yang bersifat universal, baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai kemasyarakatan (Tim P2KP , 2007:1)

## **6. Unit-unit Pelaksana Tugas BKM**

Unit-unit pengelola ini diangkat dan diberhentikan oleh BKM melalui mekanisme rapat anggota BKM. Dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitasnya, tiap tahun unit-unit pengelola wajib mempertanggung-jawabkan semua kerja mereka kepada BKM di dalam rapat anggota tahunan BKM.

Unit-unit pengelola BKM antara lain :

- 1) Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan merupakan salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai pengelolaan

2) Unit Pengelola Lingkungan (UPL)

Unit Pengelola Lingkungan merupakan satu diantara UP yang ada di BKM. Fungsi UPL sebagai pengelola kegiatan di bidang lingkungan perumahan dan permukiman di wilayahnya. UPL bertanggung jawab dalam hal penangan rencana perbaikan kampung, penataan dan pemeliharaan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman, tata kelola yang baik (*good governance*) dibidang permukiman dan lain-lain.

3) Unit Pengelola Sosial (UPS)

Unit Pengelola Sosial merupakan satu gugus yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan dibidang sosial. Peran UPS yaitu mengimplementasikan tugas BKM dalam peningkatan peran sosial yang mendukung terhadap peningkatan kualitas permukiman dan pencegahan kumuh serta penghidupan yang berkelanjutan

Dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari UPK, UPL, dan UPS merupakan unit mandiri dan dapat mengambil keputusan yang bersifat operasional selama tidak bertentangan dengan keputusan/kebijakan yang telah ditetapkan oleh BKM. Oleh karena itu setiap unit pengelola wajib

mempertanggung-jawabkan hasil kerjanya kepada BKM (Tata Cara Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM P2KP: 1-2).

#### **7. Bentuk Kegiatan Pemberdayaan BKM/Masyarakat**

- 1) BKM dilatih merelaisasi PJM Pronangkis dan rencana tahunan dengan melakukan kegiatan pembangunan Tridaya (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan dana Bantuan Dana Investasi dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu World Bank, Islamic Development Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu, kontribusi Pemda melalui APBD maupun swadaya masyarakat akan menjadi satu kesatuan pembiayaan untuk mencapai target peningkatan kualitas kumuh yang diharapkan
- 2) BKM dilatih merealisasikan PJM Projangkis dengan melakukan kemitraan dengan Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau lembaga masyarakat lainnya melalui kegiatan “*channeling*” (Departemen Pekerjaan Umum).
- 3) BKM dilatih melakukan kerjasama pembangunan dengan *cost sharing* (dana BDI dan dana dari Pemda, lembaga usaha, perorangan dan/atau lembaga masyarakat lainnya) melalui kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh melalui Program KOTAKU.

## D. Permukiman Kumuh

### 1. Definisi Permukiman Kumuh

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasana yang tidak memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Sementara itu, Komarudin (1997) dalam Kurniawan (2011) mengatakan bahwa permukiman kumuh adalah permukiman yang berpenghuni padat, kondisi sosial dan ekonomi rendah, jumlah rumah yang sangat padat dan ukurannya dibawah standar, prasarana lingkungan hamper tidak ada atau hamper tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, dibangun diatas tanah Negara atau tanah milik orang lain, dan di luar peraturan undang-undang yang berlaku.

Bianpoen dalam Saraswati (2000) mendefinisikan permukiman kumuh suatu permukiman yang kondisi tempat tinggal huniannya berdesakan dan tidak memenuhi standar yang layak, luas rumah tidak sebanding dengan jumlah penghuni, rumah berfungsi hanya sebagai tempat istirahat dan melindungi diri dari panas dan hujan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh ada dikarenakan ketidakteraturan bangunan, tingkat

kepadatan bangunan yang tinggi dan banyak kualitas bangunan dari segi sarana prasarana tidak memenuhi syarat.

## 2. Karakteristik Permukiman Kumuh

Menurut Anharudin (2005), permukiman liar adalah penduduk yang memiliki masalah ilegal karena bermukim di areal-areal yang ditetapkan sebagai zona bebas okupasi seperti bantaran sungai atau rel kereta api, cagar alam (budaya), lahan konservasi (jalur hijau dan atau zona penyangga). Sedangkan kelompok Marginal Kota yakni kelompok lain yang rentan dan malang (*vulnerable and disadvantage people*) yang sewaktu-waktu harus mengalami dampak permukiman kembali akibat proyek pembangunan infrastruktur perkotaan. Proyek-proyek pembangunan prasarana fisik (jalan raya, waduk, saluran irigasi, dermaga, dll) karena menggunakan lahan besar menyebabkan pemerintah mengadakan perubahan penggunaan tanah, air dan sumber daya alam lainnya. *Asian Development Bank (ADB)* menyebut kelompok ini sebagai Orang-orang yang Terkena Dampak (OTD) (Anharudin, 2005). Secara umum penduduk menjadi liar disebabkan oleh dua faktor (Srinivas, 2007), yaitu :

- a. Faktor internal, meliputi :
  1. Kurangnya aset jaminan
  2. Kurangnya aset tabungan dan keuangan lainnya
  3. Pekerjaan dengan gaji harian/penghasilan rendah (yang dalam beberapa kasus merupakan semi permanen atau sementara).

b. Faktor Eksternal, meliputi :

1. Harga lahan dan pelayanan perumahan yang tinggi
2. Ketidakperdulian dan antisipasi sebagai pemerintah dalam membantu mereka
3. Tingginya standar bangunan yang 'pantas' dan peraturan penguasa
4. Undang-undang perencanaan dan penzoningan yang berat sebelah

Penyebab di atas mengakibatkan tidak adanya pilihan terhadap rumah tangga berpenghasilan rendah sehingga menjadi liar di lahan kosong. Keliaran dilakukan baik oleh "Penguasa kumuh" mengambil sebidang lahan kosong, membaginya lagi dan menjualnya kepada beberapa rumah tangga untuk membangun rumah. Pelayanan seperti penyediaan air atau listrik disediakan oleh yang bersangkutan atau oleh kelompok permukiman liar tersebut dan biasanya dilakukan bersama-sama.

Kelompok inti permukiman liar merupakan jumlah kecil keluarga yang mendiami sebidang lahan kemudian membangun tempat perlindungan darurat dan sementara. Bangunan ditingkatkan menjadi permanen atau tambahan keluarga dapat bergabung pada kelompok ini, bergantung pada tingkat ancaman pengusiran (Srinivas, 2007)



Sedangkan menurut Patrick (1986) dalam Purnawan (2004), kehadiran permukiman liar dalam prakteknya ada beberapa macam yaitu:

1. Masa permukiman liar yang diorganisis
2. Keluarga-keluarga secara sendiri-sendiri menetap di atas tanah yang mereka anggap tidak ditempati dengan atau tanpa izin kepada mereka
3. Permukiman liar yang didasarkan pada transaksi resmi ortodoks, yaitu permukiman membeli sebidang tanah dari seseorang penjual yang memiliki tanah itu, tetapi tidak mempunyai persetujuan yang sah mengenai pembagian tanah untuk membangun rumah di atasnya, atau yang sebenarnya tidak mempunyai hak, baik untuk memiliki atau menjual tanah itu kepada siapapun. Berbekal sedikit sumber financial, keterampilan dan akses lain, serta adanya kebebasan nyata untuk mendiami lahan kosong illegal telah member kemungkinan bagi mereka untuk membangun tempat-tempat perlindungan darurat (Srinivas, 2007)

Dengan merujuk beberapa karakteristik di atas, bias dilihat bahwa sebagian besar permukiman kumuh dapa terjadi karena sarana-prasarana dan infrastruktur yang ada di permukiman kurang memadai dan kurang layak. Selain itu, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah juga ikut berperan penting dalam terciptanya sebuah permukiman kumuh.

### 3. Penyebab Permukiman Kumuh

Penyebab utama tumbuh permukiman kumuh menurut Khomarudin (1997) adalah sebagai berikut :

1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok yang berpenghasilan rendah
2. Sulit mencari pekerjaan
3. Sulitnya menyewa dan mencicil rumah
4. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan
5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta disiplin warga yang rendah
6. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah

Pendapat lain juga diungkapkan Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003:3-5) penyebab ada permukiman kumuh adalah :

1. Karakter bangunan yaitu umur bangunan yang sudah terlalu tua , tidak terorganisasi, ventilasi, pencahayaan dan sanitasi yang tidak memenuhi syarat.
2. Karakter lingkungan yaitu tidak ada *open space* (ruang terbuka hijau) dan tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi keluarga , kepadatan penduduk yang tinggi, sarana prasarana yang tidak terencana dengan baik.

Apabila melihat penyebab permukiman kumuh maka hal yang dapat disimpulkan adalah bagaimana kepadatan penduduk sangat

mempengaruhi kondisi suatu permukiman. Selain pola pikir dan perilaku masyarakat, perpindahan penduduk (migrasi) yang tidak terkendali dapat mempengaruhi suatu permukiman dengan adanya bangunan-bangunan rumah illegal dan tidak layak, hal ini sering terjadi terutama pada wilayah permukiman di perkotaan.

#### **4. Strategi Penanganan Permukiman Kumuh**

Penanganan permukiman kumuh Kota Malang dengan menggunakan strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan dan kebijakan penanganan kawasan permukiman kumuh. Adapun strategi penanganan permukiman kumuh Kota Malang adalah sebagai berikut :

- 1) Strategi untuk mencapai kebijakan pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebagai berikut :

Peremajaan permukiman kota segala upaya dan kegiatan pembangunan yang terencana untuk mengubah/ memperbaharui suatu kawasan terbangun di kota yang fungsinya sudah merosot atau tidak sesuai dengan perkembangan kota. Sehingga kawasan tersebut dapat meningkat kembali fungsinya dan menjadi sesuai dengan pengembangan kota. Peningkatan fungsi dalam peremajaan kota dimaksudkan untuk memperbaiki tatanan social ekonomi di kawasan bersangkutan agar lebih mampu menunjang kehidupan kota secara lebih luas.

Peremajaan harus dapat memecahkan kekumuhan secara mendasar, karenanya tidak hanya member alternative pengganti lain yang pada kenyataanya dapat menimbulkan kekumuhan di tempat lain dan menjadikan beban baru bagi masyarakat, tetapi peremajaan harus tanpa menggusur dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Sehingga peremajaan yang antara lain dengan perbaikan fisik dipakai sebagai suatu alat untuk peningkatan taraf hidup yang sekaligus memperbaiki pula kondisi fisik kota.

- 2) Strategi untuk mencapai kebijakan peningkatan kapasitas dan kerjasama kelembagaan dalam penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

Pembangunan yang bertumpu pada kelompok masyarakat secara umum dapat dikatakan sebagai metod, proses, pendekatan dan bahkan pranata pembangunan yang meletakkan keputusan-keputusannya berdasarkan keputusan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini yaitu agar hasil pembangunan dapat diterima oleh masyarakat penghuni kawasan tersebut sesuai dengan kegiatan yang telah mereka laksanakan. Dalam pendekatan ini, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam proses perencanaan dan perencanaan program pembangunan. Dua hal dapat ditarik dari pendekatan untuk permukiman. Pertama, metode partisipasi merupakan metode penting karena dengan metode inilah

keputusan-keputusan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat diambil. Kedua, karena pendekatana partisipatif dalam konteks ini adalah bersifat langsung, pengertian masyarakat selalu diartikan kelompok yang langsung memiliki kepentingan dengan proses pembangunan permukiman yang terkait. Karena itu, seringkali pendekatan pembangunan bertumpu pada masyarakat dilakukan untuk pembangunan yang bersifat local dan berorientasi pada kepentingan lokal.

Keberhasilan suatu pembangunan yang melibatkan swadaya masyarakat yaitu adanya keberlanjutan financial untuk pembangunan. Setelah tidak ada bantuan pemerintah masyarakat mampu memelihara hasil pembangunan untuk generasi yang akan datang.

#### **E. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani kemiskinan dengan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan (P2KP) yang telah berlangsung sejak tahun 1999 dan pada tahun 2007 program tersebut menjadi program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

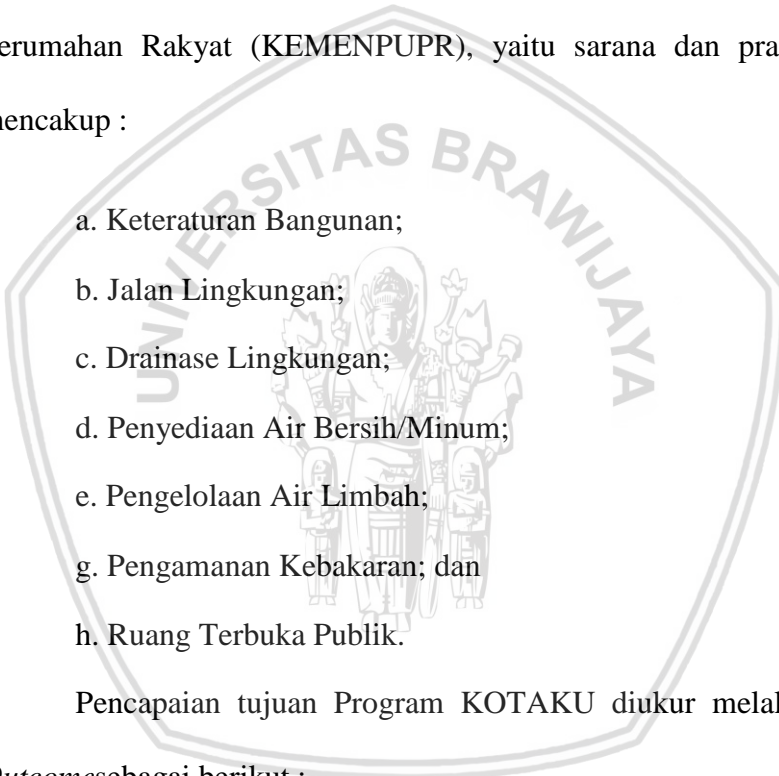
Tujuan pelaksanaan KOTAKU adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Menurunnya luas permukiman kumuh
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik
3. Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan KOTAKU merupakan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas

permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% atau 0 Ha. Kriteria permukiman kumuh yang digunakan pada Program KOTAKU ini menggunakan indikator 7+1 Yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMENPUPR), yaitu sarana dan prasarana yang mencakup :

- 
- a. Keteraturan Bangunan;
  - b. Jalan Lingkungan;
  - c. Drainase Lingkungan;
  - d. Penyediaan Air Bersih/Minum;
  - e. Pengelolaan Air Limbah;
  - g. Pengamanan Kebakaran; dan
  - h. Ruang Terbuka Publik.

Pencapaian tujuan Program KOTAKU diukur melalui Indikator *Outcomes* sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada permukiman kumuh sesuai dengan criteria permukiman kumuh yang ditetapkan;
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik;

3. Terbentuknya dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat Kota/Kabupaten untuk mendukung program KOTAKU;
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di permukiman kumuh; dan
5. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh.

### **1. Strategi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)**

Strategi pendampingan Program KOTAKU meliputi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan SKPD terkait dalam penyusunan rencana peraturan daerah (Raperda) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pendampingan penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di perkotaan, keterpaduan penanganan permukiman kumuh di perkotaan, penanganan kumuh berbasis masyarakat dengan revitalisasi Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan penanggulangan kemiskinan di perkotaan.

Peran BKM berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dengan mengembangkan seras mengoptimalkan sumber daya local dan hanya mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), menyusun Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP), melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai indicator kumuh 7+1 yang berskala lingkungan, mengubah kondisi social yang didukung oleh



perubahan perilaku masyarakat untuk menjaga kualitas permukiman yang berkelanjutan.

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan permukiman kumuh mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat masyarakat;
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
4. Memastikan rencana penanganan permukiman kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman yang akan dijadikan acuan bersama dalam perencanaan pengendalian;
6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan system kota;
7. Mengembangkan perekonomian local sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;

8. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
9. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

## 2. Prinsip Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah :

1. Pemerintah daerah sebagai nahkoda

Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sector maupun actor di tingkatan pemerintah serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.

2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome*

Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi Kota/Kabupaten yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 Ha permukiman kumuh pada 5 tahun mendatang (2019).

### 3. Sinkronisasi perencanaan dan penggaran

Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga mengacu pada visi Kota/Kabupaten dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat Kota/Kabupaten mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan

### 4. Partisipatif

Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top down) dan bawah (bottom-up) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota

### 5. Kreatif dan Inovatif

Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni

6. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang

berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

#### 7. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)

Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (good governance).

8. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.

#### 9. Revitalisasi peran BKM

Penajaman peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena informasi yang didapat yaitu berupa olahan data. Dimana dapat membantu peneliti dalam meneliti bagaimana peran BKM dalam menangani permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005:6)

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, karena peneliti ingin mendeskripsikan mengenai bagaimana peran BKM dalam menangani permukiman kumuh melalui program KOTAKU khususnya di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang serta hasil dan kendala dalam menangani permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang.

#### B. Fokus Penelitian

Agar suatu penelitian tidak bersifat meluas maka diperlukan fokus penelitian (Sugiyono, 2009) menyatakan dalam penelitian kualitatif gejala dari

suatu objek bersifat holistik (menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan). Dalam penelitian ini, yang akan menjadi fokus penelitian penulis adalah :

1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku yang di dalamnya menyangkut:
  - a. Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh
  - b. Kerjasama antar lembaga pemerintah kelurahan, pihak swasta, perguruan tinggi dan masyarakat yang peduli dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh
  - c. BKM sebagai motivator dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh
2. Kendala yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku.
  - a. Kendala internal yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku
  - b. Kendala eksternal yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang hendak diteliti untuk mendapatkan data dan informan yang hendak diteliti. Maka dari itu peneliti menentukan Kelurahan

Tanjungrejo sebagai lokasi penelitian diberlangsungkan. Sedangkan yang dimaksud dengan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, guna mendapat data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Situs penelitian Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan Tanjungsrejo Kota Malang. Alasan peneliti memilih situs penelitian tersebut karena BKM Tanjungsrejo merupakan bentuk organisasi masyarakat kelurahan yang berperan dalam mendampingi serta memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program KOTAKU melalui upaya penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah sumber- sumber penyedia informasi yang dapat mendukung informasi mengenai hal-hal yang menjadi pusat perhatian peneliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data dari sumber sesuai dengan jenis data yaitu:

##### **a. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang dapat diperoleh melalui hasil wawancara langsung dari lapangan melalui dari beberapa sumber yang memberikan informasi mengenai data-data terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan yang dapat membantu melengkapi data-data yang peneliti butuhkan.

Data primer yang didapat peneliti dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung yang didapat dari beberapa narasumber yaitu Sekretariat dan Unit Pelaksana BKM, Anggota Pelaksana Koordinasi

BKM dan masyarakat yang merasakan langsung program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo Kota Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi yang berupa dokumen atau buku-buku ilmiah serta informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sumber data sekunder ini antara lain berupa dokumen dan arsip. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil data yang didapat peneliti dari mengakses beberapa situs internet Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya (Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman) dan website Kelurahan Tanjungrejo.

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana saja data dapat diperoleh (Arikunto, 2005:107). Sumber data merupakan bagaimana cara peneliti mendapatkan data-data yang dapat digunakan sebagai penunjang kelengkapan data dalam sebuah penelitian, disini peneliti menggunakan beberapa sumber data seperti informan yang terdiri dari beberapa narasumber yang ada seperti staf-staf di BKM Kelurahan Tanjungrejo serta pihak-pihak yang terkait dengan berjalannya program KOTAKU melalui upaya penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut. Tempat atau peristiwa dimana peneliti akan mencari data dalam penelitiannya, dalam penelitian ini tempat



atau peristiwa yang sudah ditentukan adalah BKM Kelurahan Tanjungrejo serta beberapa tempat berlangsungnya program KOTAKU melalui upaya penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pada dasarnya peneliti ingin mendapatkan data yang valid, reliable dan objektif tentang gejala tertentu. Maka diperlukan teknik pengumpulan data yang tepat.

Terlepas dari apapun definisi yang akan diberikan, nampaknya “teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis dalam penelitian sebab, tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data” (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini, teknik penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Menurut Marshall dalam Sugiyono (2013) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar mengenai perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Oleh karena observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data jika : sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dikontrol reliabilitasnya dan validitasnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di lingkungan kelurahan Tanjungrejo kecamatan Sukun Kota Malang.

#### **2. Interview atau wawancara**

Selain menggunakan teknik pengamatan, pengumpulan data dapat juga dilakukan wawancara. Dalam teknik pengumpulan data dengan wawancara, informasi diperoleh langsung dari nara sumber dengan tatap muka dan bercakap-cakap. Menurut Esterberg (2002), teknik wawancara dibagi menjadi tiga: wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Pengumpulan data penelitian ini dengan metode wawancara semiterstruktur, agar dalam pelaksanaannya lebih bebas dan terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat dan ide-idenya, sementara peneliti akan mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh nara sumber.

Penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada narasumber-narasumber yang terkait dengan sub bahasan penelitian. Narasumber tersebut adalah Ibu Sri Rahayuningtyas selaku Unit Pelaksana Keuangan, Bapak Andi Andi Marsadi selaku Koordinator BKM yang juga menjadi pengurus langsung dalam pelaksanaan program ini serta Bapak Sukianto dan Ibu Sri Winarsih selaku warga Kelurahan Tanjungrejo yang terlibat dalam program ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain mengenai subjek.

Dokumentasi ini merupakan data atau informasi yang diperlukan guna menambah hasil dalam penelitian yakni dapat berupa foto, data dsb.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Instrumen yang penulis gunakan sebagai teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri, yang merupakan alat pengumpulan data utama terutama dalam proses wawancara.
2. Pedoman wawancara (*interview guide*) yang merupakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian.
3. Alat dokumentasi (*field notes*) yang merupakan catatan di lapangan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian

## G. Analisis Data

Model analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Moleong (2013) analisis data ini didasarkan pada pandangan paradigmanya yang *positivisme*. Analisis data dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan, analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah

pengumpulan data yang dilakukan satu situs dua situs atau lebih dari dua situs. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2013) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh . Analisis yang digunakan adalah cara melakukan prose penelitian secara bertahap dan interaktif pada data telah ditentukan, terdiri dari empat komponen analisis yaitu :

1. Kondensasi Data

merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

2. Penyajian Data

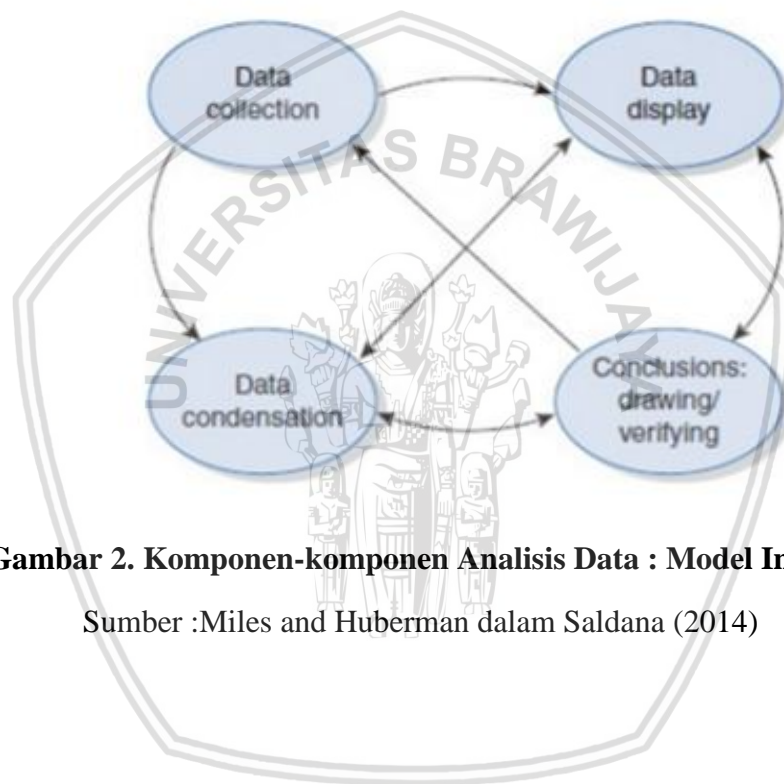
Pada penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan,

penjelasan-penjelasan serta alur sebab-akibat dan kemudian dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

Sistem kerja teknik analisa data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Saldana (2014:10) dapat disajikan dalam gambar sebagai berikut :



**Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data : Model Interaktif**

Sumber :Miles and Huberman dalam Saldana (2014)

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini menyajikan beberapa poin yang berkaitan dengan hasil temuan dilapangan yang sesuai dengan substansi penelitian ini. Hasil penelitian ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian data dari fokus penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyajikan data mengacu pada tahapan analisis data kualitatif model interaktif Miles dan Huberman, dimana terlebih dahulu peneliti melakukan tahapan reduksi data mentah dari data primer maupun data sekunder di lapangan yang dituang ke dalam penyajian data. Sebelum menyajikan data dari fokus penelitian maka berikut ini peneliti menyajikan gambaran umum lokasi penelitian.

##### 1. Gambaran Umum Kelurahan Tanjungrejo

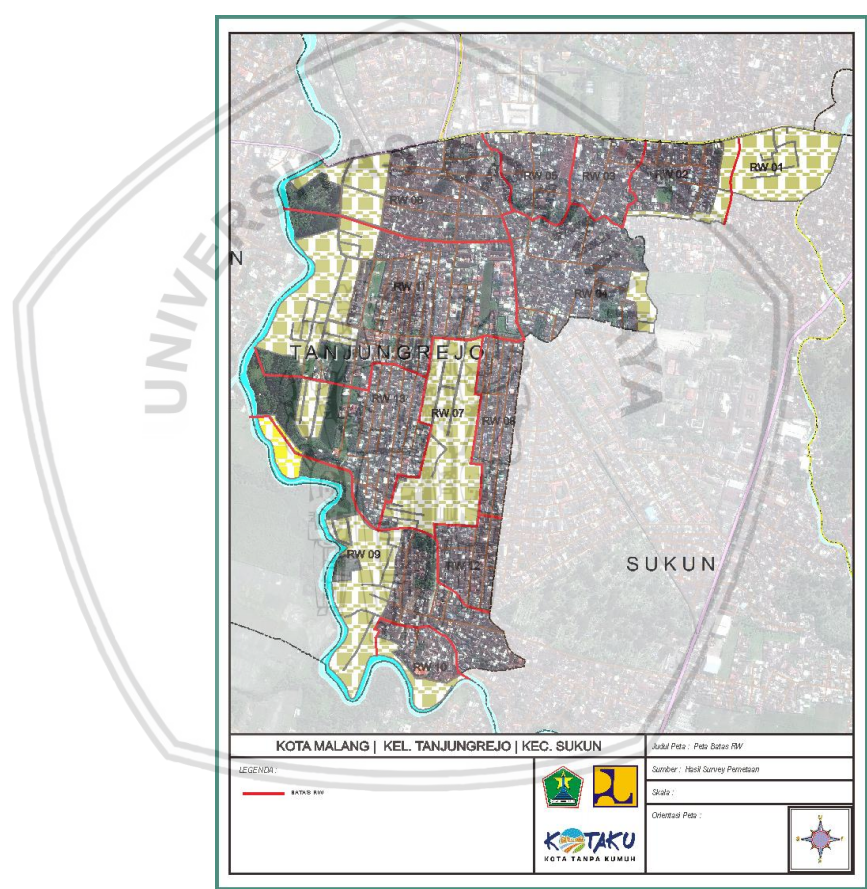
###### a. Kondisi Geografi

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Adapun luas wilayah Kelurahan Tanjungrejo adalah 92,95 Ha dan berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen
2. Sebelah Timur : Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun
3. Sebelah Selatan : Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun

4. Sebelah Barat : Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun

Adapun gambaran posisi Kelurahan Tanjungrejo dalam Kecamatan Sukun dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 3. Peta Administrasi Kelurahan Tanjungrejo

Sumber : RPLP (2016)

Berdasarkan gambar diatas Kelurahan Tanjungrejo memiliki 13 RW dan 138 RT.



### b. Kondisi Demografis

Kebutuhan informasi terkait dengan kondisi demografi berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung suatu wilayah, bahwa kebutuhan data dan informasi yang disajikan yaitu berkaitan dengan jumlah penduduk, populasi penduduk dan luas lahan selengkapnya kondisi kependudukan pada wilayah Kelurahan Tanjungrejo dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.  
Kondisi Kependudukan di Kel. Tanjungrejo

RW	Kepala RT	Kepala RT		penduduk laki-laki	penduduk perempuan
		MBR	Non MBR		
1	457	537	111	901	894
2	408	526	187	807	816
3	209	252	174	393	414
4	634	739	157	1238	1280
5	165	183	105	278	312
6	802	884	160	1463	1551
7	337	374	15	624	613
8	291	367	158	524	559
9	749	914	233	1521	1502
10	323	363	134	574	588
11	1242	1242	935	2232	2287
12	382	490	280	702	738
13	330	374	110	530	669

Sumber : Hasil Baseline Kelurahan (2015)

Apabila didasarkan sebaran jumlah rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tiap RW maka RW 11 dan RW 12 memiliki jumlah rumah tangga MBR yang paling banyak dibanding RW lainnya, dimana yang paling tinggi sebanyak 935 rumah tangga.



Kemudian untuk RW dengan jumlah rumah tangga MBR paling sedikit adalah RW 7 yang hanya 15 rumah tangga.

**a) Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Tanjungrejo sangat beragam, mulai dari sektor sekunder dan tersier. Selain jenis tersebut masih terdapat jenis mata pencaharian lainnya sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 6.**

**Jumlah Penduduk Kel. Tanjungrejo Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	522
2	ABRI	211
3	Karyawan Swasta	9.352
4	Wiraswasta/ Pedagang	4.143
5	Petani	15
6	Pertukangan	214
7	Pensiunan	252
8	Pemulung	15
9	Jasa	275
Jumlah		14.999

Sumber : Monografi Kelurahan (2015)

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa mata pencaharian sebagai karyawan swasta adalah jenis pencaharian penduduk terbanyak di Kelurahan Tanjungrejo. Disusul secara berturut-turut oleh jenis pencaharian pedagang, PNS, jasa dan pensiunan.

### b) Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat kesejahteraan penduduk salah satunya didukung dengan tingginya angka partisipasi sekolah. Pendidikan merupakan hak setiap masyarakat yang harus di sediakan dan difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun daerah. Tingginya angka partisipan sekolah menjadi tolak ukur dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun tingkat pendidikan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo yaitu sebagai berikut :

**Tabel 7. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Tanjungrejo**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	985
2.	Sekolah Dasar	3.764
3.	SLTP	2.704
4.	SLTA	3.673
5.	Akademi (D1-D3)	547
6.	Sarjana (S1)	346
7.	Pasja Sarjana (S2-S3)	16
Total		12.035

Sumber : Monografi Kelurahan (2015)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kelurahan Tanjungrejo didominasi oleh lulusan Sekolah Dasar, kemudian lulusan SMA dan disusul oleh lulusan SMP. Sebagian besar penduduk Kelurahan Tanjungrejo telah mengenyam pendidikan formal. Namun terdapat juga warga yang belum atau tidak tamat SD.

**c) Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

Data penduduk umur diperlukan untuk mengetahui jumlah usia produktif yang dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini:

**Tabel 8. Jumlah Penduduk Kel. Tanjungrejo Kec. Sukun Kota Malang Berdasarkan Rentang Usia**

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	Usia 0-15 Tahun	<b>6.602</b>
2.	Usia 16-65 Tahun	<b>21.585</b>
3.	Usia $\geq$ 66	<b>1.904</b>
Jumlah		<b>30.091</b>

Sumber : Monografi Kelurahan (2015)

Usia 16-65 Tahun dapat dimasukkan dalam kategori usia produktif maka masyarakat Kelurahan Tanjungrejo sebagian besar warganya adalah produktif dan dianggap mampu dalam partisipasi pembangunan infrastruktur dari program KOTAKU.

**d) Tingkat Kesejahteraan Penduduk**

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Tanjungrejo beraneka ragam antara lain : Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, petani, pertukangan, buruh tani, jasa dan pemulung. Masih banyak

dijumpai warga yang ekonominya cukup rendah. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya warga yang mata pencahariannya sebagai pemulung, pengamen dan bahkan pengemis. Selain itu masih banyaknya pengangguran juga menjadi persoalan yang mendesak untuk segera ditangani agar masyarakat bias hidup dengan layak dan sejahtera. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan pemberian bantuan modal serta pelatihan kerja terutama bagi usia angkatan kerja.

#### a. Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjungrejo

Dalam aktifitas masyarakat Kelurahan Tanjungrejo didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang ada, yakni sebagaimana tabel 8 di bawah ini :

Tabel9  
Jumlah Sarana dan Prasarana Masyarakat Kel. Tanjungrejo  
Kec. Sukun Kota Malang

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	a. Kantor Kelurahan	Semi Permanen/ Permanen
2.	b. Prasarana Kesehatan :	Ada/Tidak
	Puskesmas	1
	UKBM (Posyandu)	1
	Poliklinik ( Balai Pelayanan Masyarakat)	
3.	c. Prasarana Pendidikan :	Ada/Tidak
	Gedung Sekolah Paud	7
	Gedung Sekolah SD	9
	Gedung Sekolah SMP	1
	Gedung Sekolah SMA	
	Gedung Perguruan Tinggi	
4.	d. Prasarana Ibadah :	Ada/Tidak
	Masjid	12
	Mushalla	26

	Gereja	4
	Pura	1
	Wihara	
	Klenteng	
5.	Prasarana Umum :	Ada/Tidak
	Olahraga	2
	Kesenian/ Budaya	4
	Balai Pertemuan	13
	Lainnya	

Sumber : Monografi Kelurahan (2015)

#### a) Kondisi Lingkungan

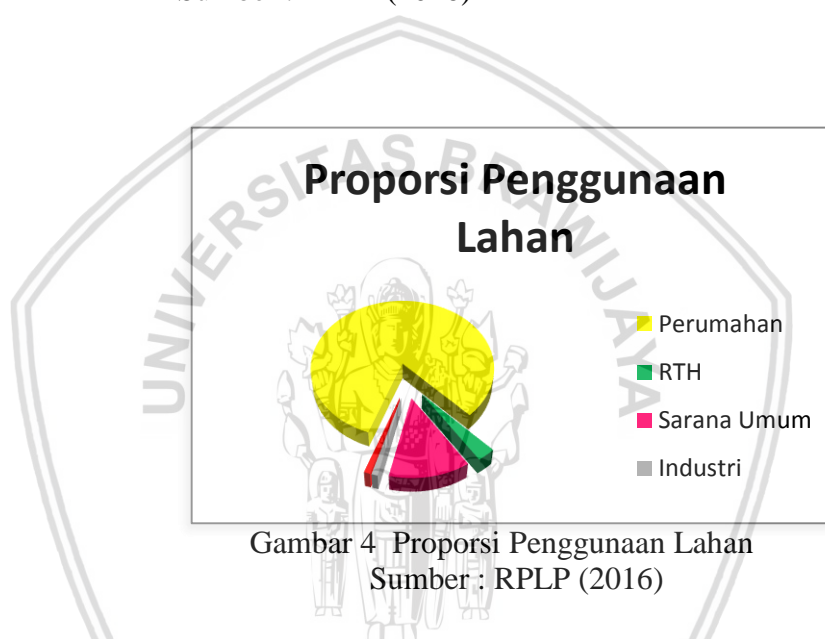
Karakteristik penggunaan lahan pada Kelurahan Tanjungrejo secara umum didominasi oleh guna lahan permukiman beserta fasilitas umum pendukung permukiman (fasilitas perdagangan, peribadahan, industry rumah tanga, pemerintahan, serta pendidikan). Seiring dengan penambahan dan perkembangan penduduk, Kelurahan Tanjungrejo yang dahulu didominasi oleh Permukiman saat ini hamper keseluruhan sudah berubah menjadi permukiman. Salah satu indikasi yang dapat terlihat akibat perubahan tersebut adalah hampir minimnya lahan kosong yang dapat digunakan untuk aktivitas pengembangan guna lahan fungsional yang baru. Berikut merupakan luas penggunaan lahan di wilayah Kelurahan Tanjungrejo.

Tabel 10  
Data Peruntukan Lahan

No.	Sarana dan Prasarana	Luas
1.	Perumahan	82,86
2.	Ruang Terbuka Hijau	2,76

3.	Sarana Umum	12,76
4.	Perdagangan dan Jasa	1,07
5.	Industri dan Pergudangan	0,77
6.	Sarana Khusus	0

Sumber : RPLP (2016)



#### b. Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat Tanjungrejo

BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) merupakan organisasi masyarakat yang otonom dan independen dengan tujuan utama melakukan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi dan menanggulangi kemiskinan dengan cara menumbuhkan kembali ikatan dan solidaritas sosial antar warga masyarakat untuk saling berkerjasama. Anggota BKM dipilih dari orang-orang yang tinggal di desa yang dinilai oleh masyarakat dari pengalamannya bermasyarakat.

Kondisi kelembagaan Pelaksana Koordinator BKM periode tahun 2015-2018 yang terbentuk pada tahun 2003 berjumlah 21 orang anggota. Berikut daftar keanggotaan BKM dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

**Tabel 11 Daftar Anggota Pelaksana Koordinasi BKM Tanjungrejo**

No.	Nama	L/P	Jabatan dalam BKM
1.	ANDI MARSANDI	L	Koordinator
2.	SRI MULYATI	P	Anggota
3.	IMAM SUHADI	L	Anggota
4.	FREEDY	L	Anggota
5.	ROFI	L	Anggota
6.	SRI INDRAYANI	P	Anggota
7.	SAIMIN	L	Anggota
8.	GRISWINDARI	L	Anggota
9.	SUNAR	L	Anggota
10.	ADI SUKOCO	L	Anggota
11.	SULAIMAN NAFI S.	L	Anggota
12.	SARNO AJI	L	Anggota
13.	M. ANDI	L	Anggota

Selain itu, daftar unit-unit pengelola hasil keputusan BKM di antaranya seperti pada tabel berikut :

Tabel 12 Daftar Sekretariat dan Unit Pelaksana BKM Tanjungrejo

NO.	Nama	L/P	Jabatan
1.	Fitriana Hidayati	P	Sekretariat
2.	Sri Rahayuningtyas	P	UPK
3.	Sukani	L	UPL
4.	Pujiastuti	P	UPS

Di dalam keanggotaan BKM Tanjungrejo telah menanamkan bahwa kelembagaan ini sebagai lembaga yang *Nirlaba* (tidak mencari keuntungan).



Gambar 5 Kantor BKM Kelurahan Tanjungrejo  
Sumber : Dokumentasi peneliti



## **B. Penyajian Data Fokus Penelitian**

### **1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

#### **a. Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Peran BKM Tanjungrejo dalam menguatkan kelembagaan sangat diperlukan dukungan dan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga-lembaga lain ataupun dengan kelompok masyarakat. Dalam rangka memperkuat fungsi internal, kinerja dan keberlanjutan sehingga lebih mampu melayani konstituennya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Fitriana Hidayati selaku sekretariat BKM Tanjungrejo menyatakan :

“Selama ini BKM Tanjungrejo juga menjalin kemitraan dengan beberapa dinas terkait diantaranya: Bappeda, PUPR, DKP, Dinkes. Bentuk kerjasama yang dilakukan biasanya berupa kegiatan dan penyuluhan selain itu mengadakan kerjasama dengan kelembagaan yang ada di Kelurahan Tanjungrejo seperti LPMK, karang taruna, PKK, RT dan RW ”. (Wawancara tanggal 10 November 2017)

#### **1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia**

Dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) melalui revitalisasi peran BKM sebagai komponen penting dalam pencegahan, peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang dilaksanakan pada permukiman kumuh kategori ringan, kumuh sedang, hingga

kumuh berat. Peningkatan Sumber daya manusia di BKM Tanjungrejo dapat dilihat dari pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh BKM Tanjungrejo sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Fitriana Hidayati selaku sekretariat BKM Tanjungrejo menyatakan :

“Dalam rangka meningkatkan kualitas pengurus BKM Tanjungrejo selama ini kita telah mengikuti pelatihan-pelatihan diantaranya pelatihan komputer, pelatihan daur ulang sampah dan lain sebagainya. Di samping itu kami juga mengirimkan anggota kami khususnya pengurus BKM untuk mengikuti diklat yang diadakan oleh dinas terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dll.” **(Wawancara tanggal 10 November 2017)**

Sejalan dengan pernyataan Bu Fitriana Hidayati diatas, anggota BKM yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yaitu Sukani selaku Unit Pengelola Lingkungan yang menyatakan bahwa :

“Selama ini saya mengikuti pelatihan yang telah diadakan, saya merasakan banyak manfaat yang saya peroleh mbak saat pelatihan diantaranya saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam pengetahuan, wawasan dan kinerja terkait Program KOTAKU untuk dimasa yang akan datang.” **(Wawancara tanggal 9 November 2017)**

Hal senada juga disampaikan oleh Bu Sri Rahayuningtyas selaku Unit Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa :

“Pelatihan yang diadakan BKM Tanjungrejo sangat bermanfaat mbak, saya dulu pernah mengikuti terkait komputerisasi, banyak ilmu yang saya peroleh dan tentunya bias bertemu dengan anggota yang lain.” **(Wawancara tanggal 9 November 2017)**

Adapun jenis-jenis pelatihan yang selama ini telah diikuti oleh BKM Tanjungrejo yang ditujukan untuk pengurus maupun masyarakat diantaranya :

1. Pelatihan Aparat Kelurahan/Desa, BKM/LKM dan Relawan
2. Pelatihan Tim Inti Perencanaan Partisipatif
3. *On The Job Training* bagi TIPP
4. Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat
5. Paket Pengembangan Media Warga

(Sumber: Buku PJM BKM Tanjungrejo 2015)

Pelatihan-pelatihan yang diberikan sangat bermanfaat bagi aparat Kelurahan Tanjungrejo dan masyarakat guna menambah kemampuan mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lapangan nantinya aka dapat terlaksana sesuai harapan bersama. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Pak Andi Marsadi menyatakan :

“ Pelatihan yang kami ikuti pasti sangat bermanfaat karena itu merupakan modal untuk mandiri, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga nanti bias digunakan sebagai bekal untuk hidup dan tugas yang diamanahkan dapat berjalan dengan baik.”  
(Wawancara tanggal 9 November 2017)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, perwakilan warga yaitu Sri Winarsih yang mengikuti pelatihan juga menyampaikan bahwa :

“Saya senang sekali mbak dengan pelatihan yang diadakan bias menambah pengetahuan saya khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga saya selain itu saya bias tersadar begitu pentingnya menjaga kualitas lingkungan permukiman.”  
(Wawancara tanggal 10 November 2017)

Berdasarkan pemaparan diatas pelatihan yang diadakan oleh dinas terkait baik yang ditujukan untuk pengurus BKM maupun untuk masyarakat sejauh ini sudah cukup bermanfaat. Pelatihan tersebut dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia selain itu juga menambah ilmu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo.

## 2) Pengakuan dan Dukungan Masyarakat

Pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap BKM akan menciptakan kestabilan sehingga lembaga tersebut dapat membuat dan melaksanakan keputusan yang dilaksanakan secara kolektif dengan jalan musyawarah bertujuan menguntungkan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Marsadi yaitu :

“Masyarakat antusias sekali mbak dalam kegiatan yang diadakan oleh BKM, karena masyarakat sudah mengetahui apa itu pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM. Walaupun untuk pertama kali sosialisasi kegiatan ini mendapat beragam tanggapan dari masyarakat ada yang semangat, antusias ada juga yang biasa-biasa saja karena beragam alasan seperti kesibukan masyarakat mencari nafkah dan pola pikir masyarakat selalu tertuju pada (Bantuan Langsung Masyarakat) BLM sehingga untuk sosialisasi harus menunggu waktu luang masyarakat.” (Wawancara tanggal 9 November 2017)

Sejalan dengan pernyataan tersebut, perwakilan warga yaitu

Supardi yang juga menyampaikan bahwa :

“Saya sangat mendukung dengan adanya program KOTAKU karena BKM memiliki kekuatan yang besar dalam penanganan permukiman kumuh karena mereka adalah orang-orang baik yang dipilih oleh masyarakat tanpa pencalonan dan tanpa kampanye. Jadi mereka betul-betul relawan untuk membantu warga di Kelurahan Tanjungrejo ini mbak. Selain itu pengalaman panjang BKM dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan menurut saya dapat membantu menyelesaikan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo ini. **(Wawancara tanggal 8 November 2017)**

Hal senada juga disampaikan oleh Bu Sri Winarsih warga Kelurahan Tanjungrejo, yang menyatakan bahwa :

“Setelah ada BKM banyak sekali pembangunan fisik yang diadakan diantaranya pembuatan gorong-gorong, pembersihan rumah yang tidak layak pakai, perbaikan jalan, penyediaan air bersih dll. Hal ini tentunya sangat menyenangkan karena mempermudah akses warga dalam menjalankan kehidupan.” **(Wawancara tanggal 8 November 2017)**

Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo dengan bekerjasama melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan lain seperti LPMK, RT, RW, PKK dan lain sebagainya dapat digambarkan melalui kegiatan pembangunan fisik seperti pembangunan gorong-gorong dan pemasangan paving. Kegiatan tersebut menandakan kepedulian masyarakat untuk bekerjasama meningkatkan infrastruktur di Kelurahan Tanjungrejo lebih baik lagi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial dan lingkungan.

Keaktifan masyarakat dalam mengikuti program-program BKM dapat terlihat dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di

Kelurahan Tanjungrejo berdasarkan 7 indikator kekumuhan. Berikut data baseline sebagian yang sudah terlaksana :

**Tabel 13 Data Baseline RW 9 Kelurahan Tanjungrejo**

RT	RW	Indikasi Masalah	Volume Masalah (BL)		Volume Masalah (PS)	
2	9	Rehab Rumah	1	buah	1	buah
4	9	Rehab Rumah	3	buah	3	buah
6	9	Rehab Rumah	4	buah	4	buah
9	9	Rehab Rumah	15	buah	1	buah
10	9	Rehab Rumah	22	buah	4	buah
12	9	Rehab Rumah	12	buah	5	buah
13	9	Rehab Rumah	5	buah	5	buah
14	9	Rehab Rumah	10	buah	4	buah
15	9	Rehab Rumah	6	buah	6	buah
16	9	Rehab Rumah	7	buah	4	buah
17	9	Rehab Rumah	10	buah	10	buah
5	9	Rehab Jalan	40	meter	40	meter
7	9	Rehab Jalan	3	meter	3	meter
9	9	Rehab Jalan	260	meter	260	meter
12	9	Rehab Jalan	85	meter	85	meter
1	9	Pembangunan Drainase	120	meter	0	meter
2	9	Pembangunan Drainase	70	meter	70	meter
3	9	Pembangunan Drainase	1000	meter	50	meter
4	9	Pembangunan Drainase	90	meter	50	meter
5	9	Pembangunan Drainase	40	meter	0	meter
6	9	Pembangunan Drainase	30	meter	30	meter
7	9	Pembangunan Drainase	3	meter	3	meter
9	9	Pembangunan Drainase	260	meter	260	meter
11	9	Pembangunan Drainase	50	meter	50	meter
12	9	Pembangunan Drainase	165	meter	165	meter
14	9	Pembangunan Drainase	120	meter	120	meter
15	9	Pembangunan Drainase	57	meter	57	meter
17	9	Pembangunan Drainase	340	meter	340	meter
2	9	Rehab Drainase	70	meter	70	meter
8	9	Rehab Drainase	50	meter	50	meter
12	9	Rehab Drainase	50	meter	50	meter
1	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	26	rumah	26	rumah
2	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	26	rumah	26	rumah
3	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	18	rumah	18	rumah

4	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	8	rumah	8	rumah
5	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	14	rumah	14	rumah
7	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	16	rumah	16	rumah
8	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	36	rumah	36	rumah
9	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	64	rumah	64	rumah
10	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	25	rumah	25	rumah
13	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	40	rumah	40	rumah
14	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	3	rumah	3	rumah
16	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	20	rumah	20	rumah
17	9	Pengadaan PDAM/Perpipaan	49	rumah	49	rumah
2	9	Pengadaan WC dan Saptitank	4	rumah	4	rumah
3	9	Pengadaan WC dan Saptitank	1	rumah	1	rumah
4	9	Pengadaan WC dan Saptitank	33	rumah	33	rumah
5	9	Pengadaan WC dan Saptitank	7	rumah	7	rumah
7	9	Pengadaan WC dan Saptitank	8	rumah	8	rumah
8	9	Pengadaan WC dan Saptitank	5	rumah	5	rumah
9	9	Pengadaan WC dan Saptitank	54	rumah	54	rumah
10	9	Pengadaan WC dan Saptitank	10	rumah	10	rumah
12	9	Pengadaan WC dan Saptitank	4	rumah	4	rumah
14	9	Pengadaan WC dan Saptitank	7	rumah	7	rumah
15	9	Pengadaan WC dan Saptitank	10	rumah	10	rumah
16	9	Pengadaan WC dan Saptitank	5	rumah	5	rumah
17	9	Pengadaan WC dan Saptitank	9	rumah	9	rumah
5,9,10, 13,14, 15,16, 17	9	Pengadaan Bentor Sampah/Gerobak Sampah	215	rumah	215	rumah

Sumber: data baseline Kelurahan Tanjungrejo 2015

**b. Menjalinkan kerjasama antar lembaga pemerintah kelurahan, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat yang peduli dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Dalam mengembangkan jaringan BKM mempunyai kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terbuka luas. Berjalannya sebuah program tak lepas dari adanya beberapa pihak yang

terlibat di dalamnya, baik pihak yang langsung berinteraksi maupun tidak berinteraksi dengan subjek berjalanya sebuah program. Seperti halnya dalam menangani permukiman kumuh melalui program KOTAKU ini yang didalamnya terdapat beberapa aktor yang berperan. Bahkan pemerintah telah mendorong proses berjalannya kerjasama itu sendiri. Sejalan dengan pernyataan tersebut Sri Rahayuningtyas (37 tahun) selaku Unit Pengelola Keuangan yang menyatakan bahwa :

“ Selama ini BKM Tanjungrejo juga menjalin kemitraan dengan beberapa dinas terkait, selain itu juga bekerjasama dengan LPMK, karang taruna, PKK, RT, RW guna sosialisasi program dan lain-lain”. (Wawancara tanggal 10 November 2017)

Kerjasama BKM dengan Kelurahan Tanjungrejo, LPMK, PKK, RT, RW dan masyarakat setempat yang telah dilaksanakan seperti dalam kegiatan-kegiatan pembangunan Kelurahan Tanjungrejo yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dilihat dibawah ini :

1. Pembangunan pavingisasi
2. Perbaikan jalan dan gorong-gorong
3. Pembangunan saluran air
4. Pembuatan gorong-gorong dan pembuatan sumur resapan
5. Bedah rumah RW I dan RW II
6. Pembuatan jamban umum
7. Pembuatan MCK

(Sumber : RPLP BKM Tanjungrejo : 2016)



Selain itu BKM Tanjungrejo menyusun program lanjutan untuk BKM bersama-sama dengan Lembaga Kemasyarakatan lain (LPMK, RW, RT, PKK dan pejabat Kelurahan) antara lain :

1. Sosialisasi berkelanjutan mengenai program KOTAKU
2. Ketertiban BKM dalam program pembangunan Kelurahan
3. Melakukan pemetaan swadaya secara berkelanjutan
4. Melakukan pembinaan terhadap KSM infrastruktur secara berkesinambungan.

Sehingga bentuk sinergi BKM baik dengan pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat itu sendiri di Kelurahan Tanjungrejo, sebagaimana yang disampaikan Bu Fitriana Hidayati selaku sekretariat BKM Tanjungrejo, yang menyatakan :

“Waktu mendapat program P2KP tahun 2005 dulu BKM Tanjungrejo sudah melakukan upaya-upaya bersama warga Kelurahan Tanjungrejo untuk menangani permukiman kumuh. Kita membangun suatu sinergi dengan masyarakat itu awalnya susah, namun dengan pendekatan beberapa waktu akhirnya kita dapat bersinergi dengan masyarakat. Di sini BKM Tanjungrejo berperan dalam menggalang potensi dan sumber daya, baik yang digunakan untuk upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan di Kelurahan. Lalu, BKM Tanjungrejo ini juga merupakan penghubung aspirasi warga ke pak Lurah dalam musrenbangkel.”(Wawancara tanggal 9 November 2017)

Dari pernyataan diatas berjalannya BKM hingga saat ini didukung oleh beberapa pihak seperti beberapa dinas terkait selain itu juga bekerjasama dengan LPMK, karang taruna, PKK, RT, RW guna mensukseskan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo.

**c. BKM sebagai motivator dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Peran BKM sebagai motivator merupakan tantangan dikarenakan motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan khususnya di tingkat Kelurahan maka tantangannya yaitu bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator bisa para tokoh yang ada di masyarakat ataupun segenap aparat pemerintahan yang ada di desa atau kelurahan, kecamatan bahkan ditingkat kota. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan sumber daya manusia, kemampuan dalam memahami lingkungan dan modal sosial, kemampuan dalam mengajak, memobilisasi menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

**1) Masyarakat Memanfaatkan Fasilitas yang Sudah Dibangun**

Penanganan Permukiman Kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang tidak dapat terwujud apabila masyarakat belum memiliki kesadaran dalam berpartisipasi dan daya dukung BKM sebagai lembaga yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU baik pembangunan fisik maupun bidang ekonomi yang ada di

masing-masing desa. Kebijakan Pemerintah melalui BKM Kelurahan bertujuan memberdayakan semua masyarakat selain itu BKM memiliki pengalaman panjang dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan sehingga dapat membantu menyelesaikan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo. Sebagaimana yang disampaikan oleh warga Bu Sri Winarsih yaitu :

“ Iya mbak seperti perbaikan jalan yang berlubang atau rusak di beberapa gang dan pengadaan air bersih yang sifatnya untuk kepentingan Kelurahan dan warga sekitarnya.” ( **Wawancara tanggal 9 November 2017**)

Program KOTAKU merupakan program yang ditujukan untuk desa/ kelurahan maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut bekerja di dalam pelaksanaan penanganan permukiman kumuh. Adapun pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Tanjungrejo seperti perbaikan jalan protokol, penyediaan sarana MCK, penyediaan air bersih, pembangunan drainase dan lain-lain yang telah dinikmati oleh masyarakat Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh warga RW 07 Pak Supardi yang mengatakan :

“Sudah mbak, salah satunya MCK yang dibangun pas di lokasi tempat saya memang sangat dibutuhkan masyarakat.” ( **Wawancara tanggal 9 November 2017**)

Dari pernyataan diatas dapat diketahui seluruh warga yang ada di Kelurahan Tanjungrejo telah menikmati hasil pembangunan yang ada di

Kelurahan mereka. Hal ini dapat member gambaran bahwa warga setempat dapat memanfaatkan fasilitas yang telah dibuat. Sejalan dengan pernyataan tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Koordinator BKM Tanjungrejo Andi Masardi yaitu :

“Masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo ini sudah sangat maksimal memanfaatkan pembangunan, mayoritas prasarana sosial dasar yang dibangun dimanfaatkan oleh masyarakat.” (**Wawancara tanggal 10 November 2017**)

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan Koordinator BKM dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah sepenuhnya dalam memanfaatkan pembangunan yang dibuat oleh BKM Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.

## **2) Masyarakat Ikut Merawat Fasilitas yang Sudah Dibuat dari Pemda, Pemerintah Desa/Kelurahan**

Masyarakat ikut merawat semua fasilitas yang telah diberikan oleh Pemerintah sebagai salah satu perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat kelurahan selain itu mereka sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Masyarakat perlu memberikan partisipasi demi tercapainya program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo yang tidak terlepas dengan kerja keras BKM. Perawatan infrastruktur ditujukan bagi semua masyarakat yang ikut menikmati hasil dari pembangunan, antara lain : MCK, pembangunan gorong-gorong, penyediaan air bersih dan pembenahan rumah tidak layak pakai.

Apabila hasil pembangunan yang telah dibuat tersebut tidak dirawat oleh masyarakat maka bantuan dana dapat dihentikan dan masyarakat tidak akan mendapatkan fasilitas dari bantuan pemerintah BKM Kelurahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Pardi selaku warga menyatakan bahwa :

“Iya mau mbak, tetapi sebagian saja karena rasa memiliki masih dapat dikatakan kurang, beberapa berfikir jika nanti fasilitas yang sudah disediakan rusak toh Pemerintah bantu lagi. Mereka tidak merasa rugi karena mereka menganggap itu bukan uang mereka.”  
(**Wawancara tanggal 24 November 2017**)

Sejalan dengan pernyataan Pak Pardi di atas, Bu Sri Rahayuningtyas selaku UPK menyatakan bahwa ;

“ Kurang menurut saya mbak, masyarakat Kelurahan sebagian besar hanya memanfaatkan setelah itu untuk urusan pemeliharaan di serahkan kepada Pemerintah.” (**Wawancara tanggal 7 November 2017**)

Sebagaimana yang dikatakan Bapak Sukianto selaku warga Kelurahan Tanjungrejo yang menyatakan bahwa :

“Yang menjadi kendala terbesar dilingkungan masyarakat kami infrastruktur yang sudah dibangun dan difasilitasi. Jangankan mau melaksanakan kewajiban mereka menjadi warga yang baik, malah sebagian besar mereka mengabaikan program atau fasilitas yang sudah disediakan oleh Pemerintah (**Wawancara tanggal 8 November 2017**)

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Razak selaku fasilitator BKM yang menyatakan bahwa :

“Ya, memang seharusnya seperti itu maksudnya selesai infrastruktur itu di bangun dan di dalam muasyawah kelurahan serah terima masyarakat membentuk satu tim yang dinamakan dengan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).”  
(**Wawancara tanggal 7 November 2017**)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BKM sebagai motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatian masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.

## **2. Kendala yang dihadapi BKM dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

BKM dalam upaya menjalankan tugasnya guna menangani permukiman kumuh melalui Kotaku selama ini tidak lepas dari adanya kendala yang dilalui. Adapun kendala dalam program KOTAKU adalah sebagai berikut :

### **1. Pelaksanaan proyek yang terhenti di tengah jalan**

Pelaksanaan proyek dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Proyek yang terhenti di tengah jalan mengganggu masyarakat dan menimbulkan ancaman membahayakan. Misalnya, lubang-lubang yang dibuat di pinggir jalan untuk proyek perbaikan drainase. Ada pekerjaan yang terhenti sementara waktu, sehingga lubang dan material itu justru membahayakan masyarakat pengguna jalan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Sukianto (40) bahwa :

“Di beberapa titik , pembangunan drainase banyak yang hanya digali lubangnya dan tak kunjung dibangun. Seperti halnya di RW 7, RW 9, RW 3 dan RW 1 di Kelurahan Tanjungrejo. Banyak pengerukan bego yang dilakukan. Namun, timbunan hasil pengerukan dibiarkan begitu saja. Di samping itu box culvert yang sudah dating juga tidak kunjung dipasang . Sehingga di beberapa titik proyek justru terkesan mangkrak”

Anggaran dana yang dimiliki Kelurahan Tanjungrejo bisa dibilang cukup terbatas untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan lanjutan. Sebab pencairan dana program Kotaku dibagi menjadi tiga termin. Pertama 60 persen, 30 persen, dan 10 persen. Jadi untuk melakukan rencana-rencana kegiatan lanjutan, Pemerintah Kelurahan Tanjungrejo dan BKM Tanjungrejo sering mengajukan kemitraan. Sehingga hal tersebut memperlambat jalannya proses pembangunan dikarenakan untuk mendapatkan persetujuan dana kemitraan tersebut membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, untuk adanya sosialisasi upaya sementara yang dilakukan untuk menghemat anggaran dana seringkali memanfaatkan mitra yang sudah bekerja sama dengan Kelurahan Tanjungrejo. Seperti yang dijelaskan oleh UPK Ibu Sri Rahayuningtyas bahwa:

“Datengin orang gitu kan pake biaya mbak biasanya kita manfaatin yang udah kerjasama sama kita kayak *I Wash* yang di RW 10 membuka wawasan mengenai hidup sehat, cara cuci tangan yang baik dan benar, dan membuka wawasan mengenai menjaga lingkungan sekitar untuk konsumsi biasanya giliran dari RW 1-13”. (Wawancara tanggal 23 November 2017)

Selain itu dari sebagian masyarakat menyepakati untuk menyiapkan konsumsi ketika musyawarah dan pelaksanaan kegiatan fisik berupa pembangunan infrastruktur. Tugas tersebut disepakati dan didanai swadaya oleh masyarakat setempat hal ini dikarenakan dana program KOTAKU hanya boleh digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh masyarakat, adapun untuk pengeluaran lainnya adalah swadaya dari masyarakat setempat dimana

proyek akan dilaksanakan. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu perwakilan warga Bapak Junaidi Ilham (42) dalam proses wawancara sebagai berikut :

“Ibu-ibu warga sini saat ada musyawarah kelurahan atau lagi saat kegiatan pembangunan fisik dilaksanakan menyediakan minuman kayak kopi, teh atau es kalau cuacanya lagi panas, gak Cuma minuman, makanannya juga mbak dibuatin gorengan, kue atau kalau tidak kita masak nanti makan bareng-bareng kalau udah masuk waktu makan siang. Buatnya biasanya di *rolling* mbak ga yang melulu satu rw aja buat penyajian makan.” (**Wawancara tanggal 9 November 2017**)

## 2. Partisipasi Masyarakat yang menurun

Rendahnya kesadaran masyarakat yang ikut andil dalam program KOTAKU menjadi kendala. Partisipasi masyarakat dalam program KOTAKU dinilai sangat penting, hal ini karena pada dasarnya metode program KOTAKU adalah mempertemukan perencanaan makro (*top-down*) dengan perencanaan mikro (*bottom-up*) sehingga semua ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan baik masyarakat, pemerintah dan kelompok-kelompok yang peduli lainnya. Hal tersebut dijelaskan oleh salah satu warga di RW 9 yang merasakan Program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo Bapak Sukianto (40) dalam proses wawancara mengatakan sebagai berikut :

- a. Kesibukan masyarakat, sebagian besar mata pencaharian penduduk Kelurahan Tanjungrejo adalah Karyawan Swasta, sehingga masyarakat hanya mempunyai waktu luang sedikit untuk membenahi lingkungan sekitar karena waktu mereka dihabiskan di



tempat pekerjaan atau masyarakat tidak peduli dengan program tersebut.

- b. Latar belakang pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk diajak maju yang maunya hanya menerima hasil saja dan tidak mau ikut berpartisipasi dalam program pembangunan.
- c. Faktor alam biasanya berupa hujan deras, tanah longsor dan angin kencang

Sejalan dengan pernyataan masyarakat Bapak Sukianto yang di atas Sri Rahayuningtyas menyatakan bahwa :

“Kendala untuk di BKM diantaranya para pengurus BKM ini tidak mendapat gaji kecuali UPK, maka dari itu terkadang pengurus tidak profesional dalam menjalankan tugas terkadang cenderung malas-malasan. Kesibukan anggota yang sebagian masih mementingkan kepentingan pribadi terlebih dahulu tidak hanya itu kegiatan yang ada dalam program jaraknya terlalu dekat dengan pencairan dana sehingga para pengurus harus kerja cepat untuk membuat laporan akhir tahun.” (Sumber: wawancara 23 November 2017)

Warga masyarakat Pardi yang menyatakan bahwa :

“Secara keseluruhan BKM sudah cukup membantu masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh namun masih perlu diperhatikan lagi terkait siapa saja proposal permohonan pembenahan yang diterima jangan hanya orang yang dekat dengan pengurus, tetapi lebih ke RW mana yang membutuhkan selain itu juga kalau bias jalan poros di depan gang saya segera di perbaiki karena sudah banyak yang berlubang dan kalau turun hujan sering banjir”. (Sumber: wawancara 22 November 2017 )

Dari wawancara tersebut terlihat bahwa faktor yang menjadi penghambat penanganan permukiman kumuhdi Kelurahan Tanjungrejo adalah :

1. Faktor alam yang berupa hujan deras, tanah longsor dan angin kencang
2. Latar belakang pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk diajak maju
3. Kesibukan masyarakat dan para pengurus BKM yang dikarenakan sebagian besar mata pencaharian swasta sehingga waktu banyak dihabiskan di tempat kerja sehingga kinerjanya kurang optimal
4. Anggaran dana yang terbatas disisi lain pencairan dana yang dibagi menjadi tiga termin.

## **B. Analisis Data**

### **1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Tujuan pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi dalam Nasirin 2010:107 yaitu :

1. Membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil seperti petani kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang dikesampingkan

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara rasio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka namun sanggup berperan dalam pengembangan masyarakat.

Pelaksanaan peran BKM dalam penanganan permukiman kumuh awalnya merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang dan Surat Edaran Nomor : 40/SE/DC/2016 mengenai pedoman umum program kota tanpa kumuh (KOTAKU) dengan revitalisasi peran BKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

**a. Penguatan Kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Nugroho (2007) pemberdayaan merupakan sebuah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Sebagai pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang memiliki tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pandayaan.

1. Penyadaran, target sasaran merupakan masyarakat yang kurang mampu sehingga harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Disamping itu

juga mereka harus dimotivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari ketidakberdayaannya. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan

2. Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memajukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Dimana tahap ini dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat tersebut
3. Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

Peran kelembagaan dalam pemberdayaan sangat diperlukan, berdasarkan informasi yang tercantum dalam SOP BKM yang dikolaborasikan dengan hasil wawancara dengan warga dan pengurus BKM maka dapat disimpulkan peran yang sudah dilaksanakan BKM ini diantaranya :

1. BKM dapat menjadi lembaga yang transparan, terbukti dari adanya laporan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh BKM
2. BKM dapat menjadi lembaga yang independen terbukti dengan tidak adanya partai politik yang ikut campur dalam setiap pengambilan keputusan
3. BKM dapat memperjuangkan aspirasi kepentingan masyarakat secara aktif, yaitu berupa proposal yang diusulkan oleh KSM yang selanjutnya akan diproses oleh BKM.
4. BKM sebagai dewan pengambil keputusan dengan proses demokrasi, hal ini terlihat dalam memutuskan proposal mana yang akan diprioritaskan untuk didanai dan pemilihan pengurus yang dilakukan secara langsung oleh warga

### **1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia**

Pelatihan bagi aparat dan masyarakat sangat berpengaruh bagi keberlangsungan berjalannya sebuah lembaga. Menurut Tjokroamidjojo (1974: 9) mengungkapkan ciri-ciri administrasi pembangunan, meliputi:

- a. Memberikan perhatian yang lebih terhadap lingkungan masyarakat yang berbeda-beda, terutama bagi lingkungan masyarakat negara-negara baru berkembang.
- b. Memiliki peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan-tujuan pembangunan, baik dalam perumusan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaan yang efektif bahkan administrasi ikut serta

mempengaruhi tujuan-tujuan pembangunan masyarakat dan menunjang pencapaian tujuan-tujuan social, ekonomi, dan lain-lain yang dirumuskan melalui proses politik.

- c. Berorientasi kepada usaha-usaha yang mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang di anggap lebih baik suatu masyarakat di masa depan (berorientasi masa depan)
- d. Melakukan pendekatan lingkungan, berorientasi pada kegiatan (*action oriented*) dan bersifat pemecahan masalah (*problem solving*)
- e. Berorientasi kepada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan dari pemerintah. Dalam hal ini adalah kemampuan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan

Dalam point ketiga disebutkan pembangunan mendorong perubahan-perubahan (inovasi) ke arah keadaan yang di anggap lebih baik suatu masyarakat di masa depan (berorientasi masa depan). Sejauh ini BKM Tanggurejo sudah sering mengikuti pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia baik untuk pengurus BKM maupun masyarakat

## 2) Pengakuan dan Dukungan Masyarakat

Dalam upaya penguatan kelembagaan dapat dicapai melalui pendekatan pemberdayaan dengan pendekatan 5p menurut (Suharto,1997:218-219) yaitu :

a. Pemungkinan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

Dilihat dari dimensi pemungkinan BKM sebelum melaksanakan sebuah program memetakan permasalahan dan penyelesaiannya.

b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Dilihat dari dimensi penguatan BKM menjadi satu-satunya lembaga di Kelurahan yang saat ini memberikan sarana dan parasarana, serta pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU. Disini dapat dilihat dari pendanaan dana BDI sebagai modal memperbaiki infrastruktur di Kelurahan Tanjungrejo

c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan kelompok

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

Dilihat dari dimensi perlindungan BKM menjadi dewan pengambil keputusan dengan proses demokrasi, hal ini terlihat dalam memutuskan proposal mana yang akan diprioritaskan untuk didanai dan pemilihan pengurus yang dilakukan secara langsung oleh warga sehingga meminimalisir permasalahan kelompok lemah tertindas oleh kelompok kuat

- d. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Dilihat dari dimensi penyokongan BKM seringkali memberikan motivasi seperti memberikan kegiatan-kegiatan sehingga masyarakat mampu menjalankan perannya dengan baik

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha



Dilihat dari dimensi pemeliharaan kehidupan masyarakat Kelurahan Tanjungrejo masih bersifat tradisional didalam menjalani kehidupan sosialnya

Pengakuan dan dukungan masyarakat Kelurahan Tanjungrejo terhadap kelembagaan BKM TANjungrejo dapat dilihat dari banyaknya jumlah KSM di Kelurahan Tanjungrejo yaitu 62 KSM ekonomi, 12 KSM infrastruktur dan 6 KSM social dengan anggota berjumlah 128 orang. Banyaknya masyarakat yang bergabung dalam KSM sebagai bentuk upaya masyarakat untuk perbaikan keadaan kesejahteraan mereka dengan memanfaatkan dana KOTAKU ini sebagai perbaikan infrastruktur yang telah ada.

**b. Kerjasama antar lembaga pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat yang peduli dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Berjalannya program ini tentunya melibatkan beberapa aktor yang masing-masingnya mempunyai tugas demi menunjang kelancaran berjalannya penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara penulis dengan warga dan pengurus BKM yang terdiri dari beberapa unsur yang terlibat tersebut saling berinteraksi sebagaimana mestinya, karena unsure dan actor itu merupakan unsure yang paling penting karena sebagai pelaksana dalam berlangsungnya kegiatan ini.

Terlihat pada tabel 4 Sulistiyani 2004 dalam Nasirin 2010: 106 menyatakan adanya bentuk *partnership* dalam pemberdayaan masyarakat, jika dikaitkan dengan Peran BKM dalam menangani permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo maka dapat diketahui bahwa :

1. Pemerintah

Lurah/Kades dan perangkatnya merupakan unsure utama pelaksana program ini serta yang juga berperan melakukan mediasi antar pihak-pihak terkait seperti BKM, Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), Kelompok Swadaya MAsyarakat (KSM) Permukiman, Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) dan relawan.

Lurah/Kades dan dinas-dinas yang terkait dalam melaksanakan perannya pada pelaksanaan program ini sesuai dengan peraturan hukum yang menjadi landasan sera melakukan musyawarah ketika ditemukan adanya permasalahan.

2. Swasta

Dunia usaha/swasta merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan program ini dikarenakan berperan sebagai penambah sumber dana investasi dan sumber daya.

### 3. Masyarakat

Masyarakat disini adalah masyarakat sekitar yang mendapatkan dampak secara tidak langsung dari pelaksanaan program ini. Dengan dampak yang didapat, maka masyarakat dengan bebas dapat memberikan komentar bagaimana pelaksanaan penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU yang tidak terlepas dari peran BKM

BKM merupakan sebagian dari masyarakat yang menjadi fasilitasi dalam hal terdidik dalam memberikan bantuan kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan juga secara tidak langsung menjadi model yang baik.

Sejauh ini BKM Tanjungrejo berusaha membangun jaringan dengan pihak-pihak terkait baik dari intern maupun ekstern Kelurahan diantaranya : LPMK, PKK, RT, RW masyarakat setempat, PUPR, Dinkes dan Dinsos.

#### **c. BKM sebagai motivator dalam upaya mendukung penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Ada beberapa kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh BKM di lapangan menurut seperti halnya BKM yang melakukan pembinaan kepada masyarakat. Berikut ini beberapa bentuk kegiatan dalam pembinaan yang mengacu pada Sumodiningrat (2009: 104-106) :

a. Motivasi

Masyarakat khususnya keluarga yang bertempat tinggal di permukiman kumuh/ di wilayah yang cukup rawan bencana banjir dan kebakaran perlu didorong untuk membentuk kelompok untuk mempermudah dalam hal pengorganisasian dan melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat. Hal ini akan membuat masyarakat nantinya berniat untuk melakukan perubahan hidupnya menjadi lebih baik lagi.

b. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Peningkatan kesadaran disini dilakukan BKM dengan memberikan nasihat-nasihat yang berisi motivasi serta pelatihan kemampuan dilakukan melalui adanya kegiatan pendampingan.

c. Manajemen Diri

Dalam manajemen diri ini BKM berusaha untuk memberikan tanggung jawab dari adanya sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam pembinaan sehingga nantinya masyarakat dapat berfikir bahwa ada tanggungjawab yang harus diselesaikan

d. Mobilisasi Sumber

Mobilisasi sumber berikut ini dilakukan oleh Pemerintah Tangungrejo dengan dibantu oleh BKM yang memetakan beberapa peran dari pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini yang kemudian mereka dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing dan bersifat berkelanjutan

e. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Pembangunan dan pengembangan jaringan ini dilakukan oleh Pemerintah Tangungrejo dengan dibantu oleh BKM mengkomunikasikan penanganan permukiman kumuh melalui Program KOTAKU dengan beberapa pihak terkait

Sebagai motivator BKM Tangungrejo menjadikan lembaga sebagai seorang pemandu bagi masyarakat guna mendukung dan mendampingi masyarakat dalam upaya pengembangan masyarakat dan melepaskan masyarakat dari belenggu permukiman kumuh di Kelurahan Tangungrejo sehingga menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat Tangungrejo sehingga dalam pemberdayaan ini masyarakat tersadarkan akan peluang-peluang yang ada.

**1) Masyarakat Memanfaatkan Fasilitas yang Sudah Dibangun**

Fasilitas yang sudah dibangun masyarakat Kelurahan Tangungrejo sudah sepenuhnya dalam memanfaatkan pembangunan yang dibuat oleh BKM Kelurahan Tangungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Penyediaan fasilitas yang ada di Kelurahan Tangungrejo merupakan dari pengelolaan dana BDI yang diberikan pemerintah untuk melaksanakan program KOTAKU

## 2) Masyarakat Ikut Merawat Fasilitas yang Sudah Dibuat dari Pemda, Pemerintah Desa/Kelurahan

Sebagaimana yang dikatakan Ndraha dalam Sumaryadi (2005;145) diperlukan berbagai program pemberdayaan sebagai berikut :

### a. Pemberdayaan Politik

BKM disini sebagai lembaga yang menampung aspirasi warga dan yang berusaha memberikan fasilitas kepada warga sehingga masyarakat mendapatkan haknya baik berupa barang, jasa, layanan dan kepedulian

### b. Pemberdayaan Ekonomi

BKM disini meningkatkan kesempatan kerja dengan kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan

### c. Pemberdayaan Sosial Budaya

BKM berusaha memberikan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kinerja terhadap program KOTAKU

### d. Pemberdayaan Lingkungan

Dalam Pemberdayaan lingkungan BKM berusaha untuk memberikan tanggung jawab dari adanya sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam pembinaan sehingga nantinya masyarakat dapat berfikir bahwa ada tanggungjawab yang harus diselesaikan agar terdapat hubungan antar masyarakat dan lingkungan saling menguntungkan .

## **2. Kendala yang dihadapi BKM dalam menangani permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program KOTAKU**

Adapun permasalahan-permasalahan yang dialami BKM Tanjungrejo dalam menangani permukiman kumuh melalui KOTAKU, antara lain :

1. Faktor alam.
2. Latar belakang pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk diajak maju.
3. Kesibukan masyarakat dan anggota BKM yang dikarenakan sebagian besar mata pencaharian swasta sehingga waktu banyak dihabiskan di tempat kerja sehingga kinerjanya kurang optimal
4. Anggaran dana yang terbatas disisi lain pencairan dana yang dibagi menjadi tiga termin sehingga pelaksanaan program seringkali terhenti di tengah jalan .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku
  - a. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Tanjungrejo sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama dibidang pembangunan fisik. Adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan bedah rumah warga.
  - b. Kerjasama antar lembaga pemerintah, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dibuka seluas-luasnya bahkan pemerintah telah mendorong proses berjalannya kemitraan itu sendiri. BKM Tanjungrejo hingga saat ini didukung oleh beberapa pihak seperti beberapa dinas terkait selain itu juga bekerjasama dengan LPMK, karang taruna, PKK, RT, RW guna mensukseskan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo.
  - c. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Tanjungrejo sebagai motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan



keadaan masyarakat di Kelurahan Tanjungrejo sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik bangunan yang telah dibuat.

2. Kendala yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku ini juga ada dari faktor internal yaitu seperti halnya Kesibukan anggota BKM yang dikarenakan memiliki pekerjaan selain di BKM sehingga waktu banyak dihabiskan di tempat kerja. Faktor eksternal yang datang dari berbagai pihak seperti pemerintah, swasta, lembaga masyarakat dan masyarakat seperti latar belakang pendidikan yang rendah sehingga masyarakat sulit untuk diajak maju, faktor alam dan anggaran dana terbatas yang dikarenakan pencairannya berkala.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian diatas maka dapat dikemukakan lebih lanjut saran :

2. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku
  - a. BKM Tanjungrejo diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

- b. Perlu adanya peningkatan komunikasi untuk memberikan informasi dalam hal penanganan permukiman kumuh sehingga apa yang diharapkan dapat selaras
  - c. Guna mengatasi Bantuan Dana Investasi yang pencairannya berkala BKM dan masyarakat harus bekerjasama untuk mengalokasikan dana tersebut dengan sebaik-baiknya
  - d. Memaksimalkan Peran BKM dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain sehingga dapat menambah kemajuan di wilayahnya.
2. Kendala yang dihadapi BKM dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo melalui Program Kotaku
- a. Peningkatan koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sekecil kesulitan atau kesusahan yang terjadi di lapangan maka BKM akan berkordinasi dengan pihak-pihak terkait.
  - b. Memaksimalkan kegiatan rembug warga untuk membicarakan masalah-masalah yang terjadi di lapangan selama penanganan permukiman kumuh ini berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Aziz, dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Arikunto. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Buku Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri, Edisi Juli 2007
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *MANAJEMEN: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Aksara.
- Hariyanto, Asep. 2007. *Strategi Penanganan Kawasan Kumuh sebagai upaya Menciptakan Lingkungan Perumahan dan Permukiman yang Sehat*. Bandung: Jurnal PWK Unisba. Vol. 7, No.2: 11-37
- Kurniawan, Kafi. 2011. *Alternatif Kebijakan Penataan Permukiman Kumuh di Kota Malang: Persepektif Stakeholders*. Universitas Brawijaya, Malang : Skripsi yang dipublikasikan
- Miles Matthew B & Huberman A. Michael & Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: an expanded sourcebook* (edition 3). London: Sage Publication
- Moleong, J Lexy, Prof. Dr. 2005. *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- \_\_\_\_\_.2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nasirin, Choirun. 2010. *Mewujudkan kesejahteraan sosial Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Malang: Indo Press
- Noeng, M. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi ke III cetakan ke 8*. Yogyakarta :Penerbit Rake Sarasin

- Nugroho, Riant & Randy, Wrihatnolo. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pranadji, Tri. 2003. *Menuju Transformasi Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Pertanian Deptan RI
- Rohidi, Tjejep Rohendi. 2000. *Ekspresi Seni Orang Miskin : Adaptasi Simbolik terhadap Kemiskinan*. Bandung: Nuansa
- Siagian, Sondang P. 1984. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfa Beta
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfa Beta
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung:Lembaga Studi Pembangunan-STKS
- \_\_\_\_\_. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosia*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Refika Alfabeta Aditama
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama

Sumodiningrat, Gunawan. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

\_\_\_\_\_.2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Angka Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta :PT Elex Media Komputindo

Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Surat Keputusan Walikota Malang Nomor 86 tahun 2015 tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Malang

Sutrisno, D. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang. Tugas Akhir tidak diterbitkan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.*

Titisari, Ema Yunita dan Farid Kurniawan, 1999. *Kajian Permukiman Desa Pinggiran Kota Mengukur Tingkat Kekumuhan Kampung*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November

Uar, Eka Dahlan. 2006. *Strategi Dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh Di Kota Ambon* Ambon: Jurnal Fikratuna. Volume 8 Nomor 2



## INTERVIEW GUIDE

### **BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)/ Lurah**

1. Apa yang diketahui tentang BKM ?
2. Seperti apa keberadaan BKM selama ini ?
3. Kapan BKM Tanjungrejo dibentuk ?
4. Tujuan dibentuk BKM ?
5. Kapan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dibentuk ?
6. Jumlah KSM di Kelurahan Tanjungrejo ?
7. Bagaimana cara penentuan anggota KSM ?
8. Program apa saja yang BKM terapkan dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tanjungrejo ?
9. Kinerja BKM selama ini ?
10. Struktur organisasi BKM ?
11. Cara pemilihan ketua anggota BKM ?
12. Upaya BKM dalam penanganan permukiman kumuh ?
13. Seperti apa pembinaan BKM ?
14. Program yang dilakukan BKM dalam bidang lingkungan ?
15. Program yang dilakukan BKM dalam bidang social ?
16. Program yang dilakukan BKM dalam bidang ekonomi ?
17. Mekanisme kerja BKM, mengingat setiap pengurus BKM mempunyai kesibukan masing-masing karena di samping sebagai pengurus BKM mereka juga mempunyai pekerjaan yang lain ?
18. Hubungan antara BKM dan KSM
19. Tugas KSM ?
20. Fungsi KSM ?
21. Cara pembentukan KSM ?
22. Mekanisme kerja KSM ?
23. Kegiatan yang telah dilakukan oleh KSM ?
24. Berapa kali dalam setahun BKM mengadakan rapat kerja ?
25. Apa saja yang dibicarakan dan hasil dalam rapat tersebut ?
26. Kendala pelaksanaan program KOTAKU ?
27. Peran BKM dalam penanganan permukiman kumuh melalui KOTAKU ?

## Masyarakat

1. Apakah anda ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Tanjungrejo ?
2. Apakah anda memahami konsep KOTAKU?
3. Apakah terdapat apat rutin yang khusus membahas pelaksanaan KOTAKU?
4. Apabila ada rapat apakah anda terlibat dan apa saja yang dibahas?
5. Apakah anda ikut mengerahkan pikiran dan tenaga dalam pelaksanaan?
  - a. Pemetaan swadaya ?
  - b. Penggalangan kemitraan ?
  - c. Pembangunan Infrastruktur ?
  - d. Pengelolaan keberlanjutan KOTAKU, Apabila iya apa saja wujud tenaga yang anda kerahkan ?
6. Apakah anda memiliki keahlian khusus yang anda kerahkan dalam proses pelaksanaan KOTAKU?
7. Apakah tingkat keterlibatan masyarakat dalam program KOTAKU ini tinggi?
8. Apakah masyarakat yang terlibat berpartisipasi dalam program berasal dari berbagai lapisan ?
9. Apakah menurut anda program ini berhasil? Apabila iya apakah peran BKM menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan tersebut ?
10. Fakto apakah yang menghambat anda untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program KOTAKU ?





PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 188.43/35.73.112/2015

TENTANG

PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

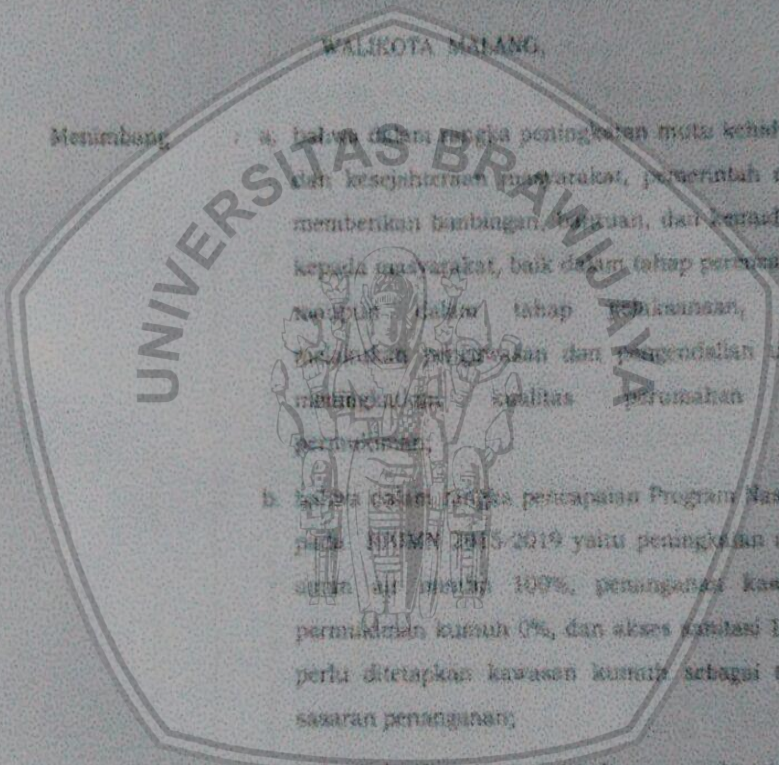
WALIKOTA MALANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat membenarkan tambahan, perbaikan, dan peradahan kepada masyarakat, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Nasional pada RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan akses air minum 100%, penangkas kawasan permukiman kumuh 0%, dan akses sanitasi 100%, perlu ditetapkan kawasan kumuh sebagai target sasaran penanganan;
- c. bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perataan Ruang;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berlandas;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR : 188.45/ ~~26~~ /35.75.112/2015  
TENTANG  
PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN  
DAN PERMUKIMAN KUMUH

DFTAR PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KUMUH

No.	Lokasi	Luas (Hektar/Ha)
1.	Kelurahan Halarjawa	2,27
2.	Kelurahan Humpang	0,25
3.	Kelurahan Pongor	0,17
4.	Kelurahan Paksi	0,55
5.	Kelurahan Mleban	17,55
6.	Kelurahan Jompan	4,80
7.	Kelurahan Kotalaya	25,70
8.	Kelurahan Mergosari	47,20
9.	Kelurahan Seman	1,40
10.	Kelurahan Pongor	2,01
11.	Kelurahan Grogol	2,70
12.	Kelurahan Gandakusum	1,62
13.	Kelurahan Bureng	81,56
14.	Kelurahan Kempan	3,10
15.	Kelurahan Kidalokan	25,02
16.	Kelurahan Kapan	48,20
17.	Kelurahan Sukoharjo	39,20
18.	Kelurahan Dadiyo	0,56
19.	Kelurahan Tigemone	2,54
20.	Kelurahan Merjawi	0,05
21.	Kelurahan Jatimulya	0,46
22.	Kelurahan Turen	8,60
23.	Kelurahan Sumpasari	17,20
24.	Kelurahan Lombaru	4,50
25.	Kelurahan Lipton	62,60
26.	Kelurahan Handungrejo	0,45
27.	Kelurahan Sekur	34,35
28.	Kelurahan Tanjungrejo	8,40
29.	Kelurahan Bandutan	27,00

WALIKOTA MALANG  
R. M. G. ANTON



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH.

KESATU : Menetapkan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 2 - 2015

WALIKOTA MALANG

ANTON

